

**PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA OLEH CAMAT
TEBING TINGGI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Tesis Pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Riau**



OLEH:

NAMA : EDI SUSANTO
NOMOR MAHASISWA : 177121034
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BKU ADMINISTRASI PUBLIK/BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA OLEH CAMAT TEBING TINGGI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Dari latar belakang diatas, Penulis menemukan masalah pokok diantaranya: *Pertama*, Bagaimana Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti ?, *Kedua*, Apa Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *survey*, karena berorientasi pada Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Tipe penelitain ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Dari hasil penelitian Pembinaan oleh camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Hal ini berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni; Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal, Bimbingan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pengarahan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal, Pelatihan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal dan Pemberian Pedoman sudah dilakukan secara maksimal. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Tebing Tinggi yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan Desa

FOSTERING VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION BY THE HEAD OF THE HIGH CLIFFS OF THE MERANTI ISLAND

ABSTRACT

The sub-district government is a level of government that has an important role in the implementation of services to the community, this is what then makes the sub-district spearhead in the implementation of general government tasks as well as part of the autonomy affairs delegated by the Regent / Mayor to be implemented in the district area. Government Regulation Number. 17 of 2018 Article 10 concerning Districts, the government assigns the Camat as the head of government to provide guidance in the administration of village governance. One form of coaching that must be carried out by the sub-district government is to provide guidance for village government administrations, because this is one of the activities that support the implementation of good village governance. From the above background, the author finds the main problems including: First, How is the Development of Village Government Administration by the Head of Tebing Tinggi Sub-District in Meranti Islands Regency? Second, What are the Barriers to Village Government Administration Development by Tebing Tinggi Sub-District Head in Meranti Islands Regency. The type of research used in the writing of this research is empirical legal research or survey, because it is oriented to the evaluation of the implementation of public entertainment policies in the city of Pekanbaru. This type of research is qualitative research, where qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior that is directed at the setting and the individual holistically (intact). From the results of research, guidance by the Camat of village government officials in a sub-district is needed to achieve orderly village government administration and an effective government system. This is based on the indicators used in this study, namely; Planning has been carried out optimally, guidance has been implemented. But it has not run optimally, the briefing has been carried out. But it hasn't run optimally yet, training has been carried out. However, it has not run optimally and Guidelines have been provided optimally. The obstacles faced by the Tebing Tinggi sub-district government are the inadequate human resources of the village apparatus and the abilities that are not in accordance with the expertise in their field of work and the delay of the village government in submitting accountability reports to the sub-district.

Keywords: Development, Administration, Village Government

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbi'alamin, puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa peradaban manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang berilmu pengetahuan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si yang telah mendidik dan mengacc proposal yang diseminarkan serta mengacc tesis ini.
4. Dosen Pembimbing I Ibuk Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyusun tesis ini hingga selesai.
5. Buat Orangtua, Adik-adik dan Kakak-kakak yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi S2.
6. Buat Istri dan Anak yang selalu mendo'akan dan mensupport untuk menyelesaikan program studi S2 ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Karyawan dan karyawanati Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Penulis

EDI SUSANTO
177121034

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Masalah Pokok	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review.....	12
2.2 Administrasi Publik.....	39
2.3 Organisasi Publik	44
2.4 Pemerintahan.....	48
2.5 Administrasi Pemerintahan Desa	50
2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia	53
2.7 Pembinaan	55
2.8 Kerangka Berpikir	61
2.9 Konsep Operasional	62
2.10 Operasional Variabel.....	63

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	67
3.2 Lokasi Penelitian.....	67
3.3 Informan Penelitian.....	68
3.4 Jenis dan Sumber Data	68
3.5 Jenis Dan Sumber Data	69
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	70

BAB IV. GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Visi Dan Misi Kecamatan Tebing Tinggi	71
4.2 Kependudukan Kecamatan Tebing Tinggi.....	71
4.3 Jumlah Perangkat Kecamatan	75
4.4 Pembinaan RT Dan RW Di Kecamatan Tebing Tinggi.....	75

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti	76
5.2 Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti	116

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	124
6.2 Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti	12
2.2 Perbedaan Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Administrasi Desa.....	52
2.3 Operasional Variabel Tentang Penelitian Tugas Camat Dalam Membina Pemerintah Desa	64
3.1 Populasi Dan Sampel tentang Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 membagi wilayah Republik Indonesia kedalam daerah besar dan kecil agar setiap daerah-daerah tersebut mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Satuan pemerintahan daerah yang terdiri dari daerah Propinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan satu samalain. Pemerintah Kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.

Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang di daerah khususnya maupun nasional pada umumnya.

Menurut Siagian (2009: 33) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selain itu pembangunan juga dapat dilihat sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b) Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa.
- e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan.

- f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau wali kota.

Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2019 menyatakan bahwa Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintahan desa juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 10 Perbub Nomor 14 Tahun 2015 memberikan pengertian apa yang dimaksud Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.

Fasilitasi yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi Karsil, (2004;119).

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan ketersediaan sumber daya.

Dalam hal ini perlu diadakannya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pimpinan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban kepadanya guna terwujudnya tujuan otonomi desa. Pada umumnya keberhasilan dari pelaksanaan otonomi desa sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah desa dan pemerintahan yang berada di atasnya.

Menurut Ismail (2001; 154). Pembinaan adalah proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir (masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna.

Sedangkan menurut Saydam (2000; 408) pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Peneliti sependapat dengan apa yang di katakana oleh Saydam bahwa pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Pentingnya dilakukan pembinaan administrasi desa dikarenakan administrasi adalah kelengkapan dari suatu organisasi pemerintahan, karena tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Wijaya, (2002; 88).

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24.

Sebagaimana diketahui, upaya untuk membangun dan memperkuat kemampuan desa, baik dari segi pemerintahan maupun komunitasnya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, titik beratnya masih cenderung pada pembenahan aspek administratif ketimbang sebagai pijakan dalam memberdayakan desa secara institusional dan secara komunitas. Selama ini upaya untuk menata pemerintahan desa masih terjadi tarik ulur antar pihak-pihak yang hanya menghendaki desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia dengan upaya untuk meletakkan otonomi asli desa yang pernah ada. Sukriono, (2013: 192)

Kurangnya pembinaan berpengaruh pada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, karena kurangnya pembinaan yang diberikan, para aparat desa tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi apabila aparat desa memiliki Sumber pembinaan yang cukup dari kecamatan dalam menjalani pemerintahan di desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Meningkat angka pertumbuhan penduduk dikecamatan tebing tinggi yang yang tergolong cukup besar dan semakin berkembang maka perlu adanya pembinaan yang menjurus yang diberikan kecamatan kepada pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan taraf hidup masyarakat.

Bedasarkan hasil pra survey yang dilakukan pada Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi. Peneliti masih menemukan beberapa permasalahan administrasi yang terjadi pada desa tersebut. Adapun beberapa bentuk permasalahan administrasi desa yang terjadi di desa tersebut yaitu;Belum adanya buku penduduk sementara

Administrasi ini sangat vital karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang mana berhadapan langsung dengan masyarakat dan segala urusan yang menyangkut mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu perlu adanya penataan administrasi di pemerintahan desa dikarenakan data yang ada tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi sebagai tolak

ukur bagi pembangunan bangsa karena pembangunan desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

Fenomena yang terlihat pada saat ini tidak tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa, masih banyak buku registrasi desa yang belum terisi, struktur desa yang tidak terisi dan monografi desa yang kosong. padahal buku dan informasi tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional, disamping itu hal tersebut menunjukkan tertibnya penataan administrasi di Pemerintahan Desa.

Kurangnya pembinaan berpengaruh pada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, karena kurangnya pembinaan yang diberikan, para aparat desa tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi apabila aparat desa memiliki Sumber pembinaan yang cukup dari kecamatan dalam menjalani pemerintahan di desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Perlunya pembinaan terhadap penataan tertibnya administrasi desa diharapkan dengan pembinaan bisa menjamin tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara, terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi, pemamfaatan pegawai sehingga dengan pembinaan bisa memiliki prestasi kerja

yang bagus dan yang mana pada akhirnya bisa mencapai dari tujuan otonomi tersebut.

Menurut Santoso (1995; 52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik maka dilakukan beberapa cara yakni;

- 1) Perencanaan adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah desa
- 2) Bimbingan adalah memberikan pelatihan, pengarahan, petunjuk, mengadakan evaluasi dan rapat kerja terhadap Pemerintahan Desa.
- 3) Pengarahan adalah memberikan pengarahan terhadap pemerintahan desa
- 4) Pelatihan adalah memberikan pelatihan terhadap pemeritah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa

Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan pembinaan administras pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha ataupun sistem pengadministrasian yang benar. Tata Usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Berdasarkan fenomena di atas menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat fenomena hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis, akademis, dan teoritis, sebagai berikut:

- a. Praktis; memberikan masukan tentang pembinaan yang dilakukan oleh camat terhadap pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Akademik; sebagai masukan terhadap apa yang terjadi dilapangan dibandingkan dengan teori-teori yang dipakai sebagai landasan berpikir dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik
- c. Teoritis; penelitian ini akan lebih mempertajam pengetahuan selama ini diperoleh dari proses belajar baik melalui penjelasan dosen maupun dari buku-buku teks yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Penulis telah melakukan literature review penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini;

Tabel 2.1

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Author	Findings
1	Ali, Omar; Osmanaj, Valmira (2020)	Namun, tingkat adopsi di pemerintah daerah regional Australia rendah dibandingkan dengan pemerintah daerah di daerah perkotaan dan metropolitan. Beberapa penelitian telah meneliti alasan di balik perbedaan ini, tetapi wawasan tersebut dapat meningkatkan pengembangan strategi untuk komputasi awan di pemerintah daerah (Departemen Ilmu dan Riset Industri Inovasi, 2011). Jadi, tanpa kerangka panduan yang jelas, lembaga pemerintah dapat secara mandiri mengadopsi berbagai layanan cloud, dan proses pengambilan keputusan terkait keputusan investasi ini akan bervariasi dalam kualitas. Mengingat bahwa menggunakan layanan cloud menimbulkan berbagai masalah yang kompleks, termasuk hukum kontrak internasional, privasi, dan kedaulatan data, dan karena teknologi ini secara fundamental terkait dengan akuntabilitas lembaga pemerintah yang ada, kecil kemungkinannya bahwa keputusan investasi ini akan sepenuhnya sejalan dengan penilaian risiko pemerintah secara keseluruhan (Bisley, 2013). Pemerintah Australia menyediakan kerangka kerja untuk memandu para pemimpin agensi untuk mengambil keputusan menerima risiko informasi dari layanan cloud berdasarkan analisis menyeluruh, dan pemerintah memberikan pengawasan ekstra dalam situasi di manainformasi pribadi terlibat. Efektivitas pendekatan ini belum ditentukan (Bisley, 2013). Sementara komputasi awan otonom ini memfasilitasi

		<p>difusi penggunaan awan, itu juga di 4.1.2. Analisis Data Berdasarkan masing-masing pertanyaan penelitian yang tercantum di atas, maka dilakukan analisis isi manual untuk menganalisis data (Miles et al., 2014). Tiga langkah diikuti dalam analisis: minimisasi data, tampilan data, dan konfirmasi hasil komputasi. Manajer C42-URL mencatat bahwa hal berikut: "Di dewan pemerintah daerah kami, tidak ada kebijakan yang diadopsi oleh dewan untuk memindahkan infrastruktur dan layanan TI ke cloud; sebenarnya ini lebih merupakan analisis manfaat biaya, daripada kebijakan khusus "(C42-URL). Penelitian ini mengkonfirmasi temuan dalam tinjauan pustaka terkait aturan efisiensi (seperti jaminan kualitas layanan kepada klien, biaya layanan, dan kecepatan Internet) dalam adopsi teknologi baru (Lian et al., 2014; Phaphoom et al., 2015. Saat mempertimbangkan layanan komputasi awan, organisasi pemerintah terjebak di antara keinginan mereka untuk menghemat biaya dan memperoleh platform teknologi terbaru (Bisley, 2013).</p>
2	<p>Arduini, Davide; Denni, Mario; Lucchese, Matteo; Nurra, Alessandra; Zanfei, Antonello (2013)</p>	<p>penggunaan an data yang diambil dari survei ICT-PA Istat 2007 dan 2009 pada 4471 kota Italia, kami mengidentifikasi faktor teknologi, organisasi, dan kontekstual yang terkait dengan pengembangan layanan e- Government di pemerintahan lokal. Kami menemukan bahwa outsourcing dan akumulasi internal kompetensi TIK sangat terkait dengan penyediaan layanan ini. Selain itu, kami mengamati bahwa aktivitas TIK internal memiliki dampak dua kali lebih tinggi pada pengembangan e- Government dibandingkan dengan alih daya TIK. Pemberlakuan layanan elektronik tingkat lanjut kemungkinannya kecil dalam kasus kota kecil, di daerah berpenduduk jarang, dan dengan adanya tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari komponen populasi yang lebih tua. Sebaliknya, ini lebih mungkin terjadi di area yang ditandai dengan aktivitas paten yang lebih intens, yang pada gilirannya mendukung permintaan yang dinamis dan canggih untuk layanan baru. Meskipun secara luas konsisten dengan "kerangka pengesahan teknologi" Fountain, temuan kami menunjukkan bahwa lebih banyak penekanan harus diberikan pada kompetensi internal administrasi publik, dan untuk konteks faktor-faktor spesifik yang mencerminkan karakteristik pengguna akhir. jaringan digital untuk pengembangan layanan berbasis web menyiratkan sejumlah transformasi organisasi dan</p>

		kelembagaan yang mendasar, termasuk: perubahan dalam proses pengambilan keputusan; meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk semua aktor yang terlibat; kodifikasi dan transmisi bit informasi; koordinasi dan peningkatan komunikasi di dalam dan di seluruh administrasi publik (PA); dan interaksi substansial dengan vendor teknologi dan pengguna layanan baru (Fountain, 2001; Serrano Cinca et al., 2003; Gil-Garcia, 2005; Arduini et al., 2010).
3	Banerjee, Parthasarathi (2001)	<p>GD di negara berkembang, khususnya administrasi pembangunan (DA), menunjukkan karakteristik seperti struktur kelompok kepentingan yang kurang berkembang, yang membatasi penggunaan pendekatan umum tersebut. Selain itu, solusi teknologi seperti pengembangan SI tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan umum dari prinsip-prinsip organisasi. Upaya untuk mengembangkan IS untuk GD dan DA dihargai sebagai tugas yang agak kompleks, dan tetap terbatas pada beberapa prinsip desain, yaitu 'desentralisasi', 'perencanaan', 'otoritas implementasi' (Mohamed & Appalanaidu, 1998; Bhatnagar, 2000; Heeks, 1998). Penelitian ini didasarkan pada studi lapangan yang dilakukan di distrik India dan pada data yang dikumpulkan tentang IS dalam struktur pemerintah India, bagaimanapun, berpendapat, bahwa gagasan desain 'desentralisasi', atau 'akses yang sama ke informasi', jika tidak tepat setidaknya sangat terbatas dalam kekuatan penjelasan dan pertimbangan normatif. Ia berpendapat bahwa IS dari DA harus memberdayakan secara informasi semua agen yang memiliki kepentingan dalam DA ini, dan tujuan ini dapat dipenuhi jika sistemnya rasional. IS untuk DA tingkat kabupaten, menurut kami, memungkinkan elit lokal berbagi kekuasaan yang adil dan 2. Pemerintahan dan administrasi pembangunan DA sebagai lawan DG bersifat</p> <p>seharusnya melakukan tindakan ffi rmatif dan mempromosikan / melantik presiden ZP, anggota terpilih untuk pemerintah pusat dan negara bagian, perwakilan anggota terpilih dari tingkat Panchayat Samiti (di bawah kabupaten tetapi di atas desa) sebagai perwakilan sisi politik dan eksekutif; dan pegawai negeri sipil (melapor ke pemerintah pusat melalui negara bagian), bupati di jajaran departemen,</p>

		<p>perwakilan dari tingkat blok, sebagai perwakilan departemen ke dalam badan omnibus perencanaan tingkat kabupaten. Ide ini disahkan melalui amandemen Konstitusi pada tahun 1977, dan negara bagian setelah amandemen ini, perlahan-lahan berubah menjadi berbagai bentuk baru. Bengkulu Barat mengembangkan DA di sekitar otoritas fokus ZP. Idenya adalah " kerangka kelembagaan untuk perencanaan kabupaten harus menjadi instrumen sosial pengambilan keputusan yang harus merupakan perpaduan yang menyenangkan antara otonomi daerah, kemampuan administratif dan keahlian perencanaan " (NIRD, 1985, hlm. 62). Secara diam-diam, model ini menolak tata kelola akar rumput PRI; itu juga menolak pemerintahan melalui pegawai negeri. ZP sebagai perpaduan kewenangan politik dan administratif kini dijadikan inti pemerintahan tingkat kabupaten. Penyelidikan utama kami dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran kepentingan dan inisiatif politik tingkat kabupaten dapat dilakukan melalui saluran informasi dan melalui sistem informasi.</p>
4	<p>Bryson, Phillip J. (2008)</p>	<p>Sistem lama cukup tahan lama sehingga administrasi negara tetap berjalan. Makalah ini membahas pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana lembaga admin negara-Banyak kota kecil dari republik kembar Selama 10 tahun pertama transisi, sistem pemerintahan dan administrasi Republik Ceko dan Slowakia, termasuk organisasi fiskal, hanya terdiri dari dua tingkatan, pemerintah pusat dan kota. Jumlah kota mandiri di kedua republik telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1989. Banyak kota dan desa yang telah dipaksa menjadi unit administratif yang lebih besar dan lebih nyaman selama periode komunis diizinkan untuk memperoleh kembali kemerdekaannya setelah tahun 1989 dan mereka melakukannya dengan antusias yang mencerminkan permintaan yang kuat untuk otonomi lokal</p> <p>Tabel 1 menunjukkan rincian ukuran kotamadya di Republik Ceko pada tahun 1994, yang cukup lama setelah Revolusi Beludru untuk menunjukkan efek reorganisasi kota dan kota yang diinginkan oleh penduduk setelah memperoleh kembali kemerdekaan. Kita tidak dapat tidak memperhatikan di sini bahwa 3760 kota di Ceko (60,3% dari total) terdiri dari kurang dari 5000 penduduk. Hanya 66 kotamadya (1,1% dari total 6230) merupakan kota dengan 20.000 atau lebih penduduk (Maly' lexikon,</p>

		1994). Slovakia memiliki jumlah kotamadya yang sama untuk populasi kira-kira setengah dari Lution No. 237, "kemajuan dan arahan utama reformasi dan modernisasi administrasi negara pusat yang terdiri dari solusi manajemen dan dukungan organisasi " (Vidla' kova', 2006). Visi reformasi adalah pencapaian penyelenggaraan negara pusat yang eksibel dan lebih baik daripada peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Penekanan penting diberikan pada tata kelola yang baik dengan pegawai negeri yang profesional dan tidak memihak.
5	Devine, Mary, Meyers, Raymond; Houssemand, Claude (2013)	Government 2.0 adalah inovasi berdasarkan Web 2.0. Pemanfaatan teknologi Web untuk melaksanakan adminsitasi 2.0 telah secara substansial mengubah cara pemerintah dapat mengoperasikan dan meningkatkan praktik kerja intra-organisasi yang ada (Sivarajah et al., 2015). Selain itu, dengan karakteristik yang mendukung partisipasi, layanan pemerintah melalui Web 2.0 memiliki potensi untuk mengubah cara pemerintah menyediakan layanan dan bagaimana hubungan antara pemerintah danmasyarakat terlihat (Nam, 2012). Media sosial telah membangun fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Media sosial memiliki empat keunggulan utama yaitu kolaborasi, partisipasi, pemanfaatan, dan waktu (Bertot et al., 2010).
6	Feng, Qun, Chen, Hong; Shi, Xuejun; Wei, Jia (2020)	Ada penerimaan yang semakin besar bahwa reformasi pendidikan berskala besar diperlukan untuk memenuhi tantangan abad ke-21. Kontribusi yang dapat diberikan oleh pembinaan dalam pengaturan ini telah menjadi fokus diskusi dan penelitian terbaru. Sebagian besar penelitian berasal dari Inggris, Amerika Serikat dan Australia, dan ini akan ditinjau untuk memberikan gambaran umum tentang beberapa pendekatan yang telah digunakan. Pencarian literatur yang sistematis telah dilakukan dengan menggunakan kata kunci "coaching" dan "education", dilanjutkan dengan pencarian manual berdasarkan referensi. Artikel, buku, dan laporan dibaca untuk mengekstrak studi yang paling relevan dan paling menarik. Ada basis bukti yang muncul bahwa pembinaan adalah alat yang ampuh untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan bagi siswa, guru, pemimpin sekolah dan lembaga pendidikan mereka. Berbagai pendekatan pembinaan telah berhasil digunakan. Pendekatan ini diuraikan: pembinaan perilaku, pembinaan berfokus pada

		solusi, pembinaan kognitif dan perilaku kognitif, pembinaan instruksional, pembinaan eksekutif, pembinaan rekan, dan kepemimpinan organisasi yang positif. Pendekatan pembinaan juga ditinjau berdasarkan fokus mereka pada tiga pelaku pendidikan utama: siswa, guru, dan pimpinan sekolah.
7	Giamellaro, Michael; Siegel, Deborah R. (2018)	Terlepas dari kesulitan, intervensi pembinaan instruksional telah terbukti menjadi prediktor yang signifikan dari prestasi siswa (Piper & Zuilkowski, 2015; Ross, 1992; Sailors & Price, 2015; Vogt & Rogalla, 2009), terutama ketika pembinaan terkait dengan kurikulum yang lebih luas. reformasi (Hopkins et al., 2013). Namun, hubungan kausal antara pembinaan instruksional dan prestasi siswa masih belum jelas. Sementara diasumsikan bahwa perubahan dalam praktik mengajar akan menjadi mekanisme untuk meningkatkan prestasi siswa, penelitian yang ada terbagi tentang dampak pembinaan instruksional pada praktik guru. Ada beberapa bukti bahwa pembinaan dapat berhasil untuk mendukung praktik pengajaran yang sangat sulit (Teemant, Wink, & Tyra, 2011; Vogt & Rogalla, 2009). Ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mungkin juga efektif untuk mendukung kompleksitas pengajaran STEM. Yang lain menemukan bahwa praktik mengajar sering kali resisten terhadap pembinaan dan perubahan praktik sering kali terhalang oleh persepsi guru, sistem kepercayaan, variasi situasional, dan faktor sistemik lainnya (Hunt, 2016; Obara, 2010; Sailors & Price, 2015; Vogt & Rogalla, 2009). Karena RPP mengkonseptualisasikan peran Pembina STEM, jelas dari 6. Sejauh mana karakteristik orang dalam peran Pembina STEM memengaruhi persepsi peran? 7. Apakah persepsi seseorang tentang peran Pembina STEM memengaruhi cara orang lain memandang peran tersebut, termasuk Pembina itu sendiri? Yang lain menemukan bahwa praktik pengajaran sering kali resisten terhadap pembinaan dan perubahan praktik sering kali terhalang oleh persepsi guru, sistem kepercayaan, variasi situasional, dan faktor sistemik lainnya (Hunt, 2016; Obara, 2010; Sailors & Price, 2015; Vogt & Rogalla, 2009). Karena RPP mengkonseptualisasikan peran Pembina STEM
8	Gil-Garcia, J. Ramon;	Aspek spesifik dari fenomena sosio-teknis ini (Borman & Janssen, 2013; Helbig, Gil-Garcia & Ferro, 2009; Luna-Reyes, Mellouli, & Bertot, 2013). Dalam artikel

<p>Flores-Zúñiga, Miguel (2020)</p>	<p>ini, Model Penerapan-Adopsi Kesuksesan Pemerintahan Digital diusulkan sebagai model komprehensif dari kesuksesan pemerintahan digital di mana faktor-faktor yang memengaruhi pemerintah dan pengguna dipandang samapentingnya dan, dalam beberapa kasus, sangat saling terkait. Model tersebut mencakup (1) kondisi eksternal (termasuk faktor politik, ekonomi, dan sosial), (2) variabel implementasi (termasuk karakteristik organisasi dan pengaturan kelembagaan), (3) karakteristik layanan pemerintah digital yang ditawarkan, (4) persepsi pengguna kegunaan dan kemudahan penggunaan, dan (5) penggunaan aktual layanan pemerintah digital. Kondisi eksternal memengaruhi karakteristik organisasi yang melaksanakan proyek pemerintah digital dan pengaturan kelembagaan di sekitarnya. Karakteristik organisasi (sumber daya dan kapabilitas) dan pengaturan kelembagaan yang ada (aturan formal dan informal) berdampak pada fitur layanan pemerintahan digital yang ditawarkan oleh lembaga. Fungsionalitas dan kegunaan sebenarnya dari layanan pemerintah digital ini berdampak pada persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaannya, sehingga menentukan niat perilaku pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan. Ini mewakili hubungan antara implementasi inisiatif pemerintah digital oleh pemerintah dengan adopsi oleh warga negara dan pengguna lain. Akhirnya, penggunaan aktual layanan pemerintah digital akan secara signifikan menentukan tingkat keberhasilan inisiatif pemerintah digital tersebut. Dengan demikian, mengembangkan layanan pemerintah digital yang sehat secara teknis sangat penting, tetapi mencapai tingkat penggunaan yang tinggi oleh warga juga sama pentingnya. sukses dari pandangan yangkomprehensif dan integratif, termasuk faktor implementasi dan adopsi. Mengikuti gagasan sebelumnya, tujuan dari studi ini adalah untuk mengusulkan model komprehensif dari kesuksesan pemerintah digital yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inisiatif ini oleh lembaga pemerintah dan diadopsinya oleh warga negara sebagai beberapa pengguna terpenting. Penelitian ini berkontribusi pada teori pemerintahan digital, tetapi juga untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kesuksesan dalam konteks desain, implementasi, dan evaluasi proyek dan kebijakan pemerintah digital.</p>
-------------------------------------	--

		<p>Artikel ini dibagi menjadi tujuh bagian, termasuk pendahuluan sebelumnya. Bagian dua mengulas literatur terbaru tentang kesuksesan pemerintah digital, terutama studi yang menyoroti penerapannya oleh pemerintah atau adopsi oleh warga negara dan pengguna lain. Bagian tiga menyajikan hipotesis yang memandu contoh ilustratif dari potensi penggunaan model yang diusulkan: "Model Penerapan Penerapan Kesuksesan Pemerintah Digital." Bagian empat menjelaskan desain dan metode penelitian, termasuk operasionalisasi variabel dan deskripsi singkat konteks kasus. Bagian lima menyajikan hasil utama dari studi ini dan bagian enam membahas beberapa dari hasil tersebut dan mengidentifikasi implikasi untuk penelitian dan praktik. Akhirnya, bagian tujuh memberikan beberapa kesimpulan dan menyarankan area untuk penelitian masa depan dalam topik ini. (2016) menemukan bahwa perencanaan dan pengelolaan proyek yang buruk secara keseluruhan, perubahan lingkup proyek, kegagalan dalam anggaran dan kontrol waktu, serta kesenjangan desain- realitas dapat menyebabkan kegagalan proyek-proyek pemerintah digital. Faktor-faktor berikut juga telah diidentifikasi sebagai faktor penting untuk keberhasilan atau kegagalan dalam proyek-proyek pemerintah digital dari sudut pandang Layanan pemerintahan digital: Keragaman layanan elektronik yang tersedia Layanan pemerintah digital: Kecanggihan kondisi layanan memengaruhi pengaturan kelembagaan, tetapi dampaknya ada indikator spesifik.</p>
9	<p>D. Gracia, D. Belanche; Casaló Ariño, LV (2015)</p>	<p>Artikel ini menjelaskan mengenai analisis reliabilitas dan dimensionalitas menggunakan software statistic SPSS Cronbach digunakan untuk menilai reliabilitas awal skala, memperoleh nilai di atas minimal 0,7 (Cronbach, 1970) dalam semua kasus. Korelasi item- total digunakan untuk meningkatkan tingkat alpha Cronbach; semua item melebihi nilai minimum 0,3 (De Vaus, 2001). Demikian juga, analisis faktor eksplorasi dilakukan untuk mengevaluasi unidimensi skala yang diusulkan. Hanya satu faktor yang diambil dari setiap skala: efisiensi, privasi, pemenuhan dan ketersediaan sistem, komunikasi administrasi publik, sikap terhadap e-government, dan kepercayaan warga pada administrasi</p>

		publik. Untuk memastikan struktur dimensi timbangan, kami menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori, menggunakan perangkat lunak EQS 6.1. Kami memilih kemungkinan maksimum yang kuat sebagai metode estimasi. Kemudian kami mengevaluasi validitas konvergen.
10	Gregory, Anne (2019)	Layanan ini... memiliki bagian penting dan permanen dalam mesin pemerintahan dalam kondisi modern. Sangat penting untuk administrasi yang baik di bawah sistem demokrasi bahwa publik harus diberi informasi yang memadai tentang banyak hal di mana tindakan Pemerintah secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. " (Deb, 1945-6, hlm. 417). tugas Kepala Pejabat Informasi kepada publik dengan istilah yang tegas: "Pertama, tugas untuk memberi tahu mereka apa yang sedang dilakukan Pemerintah atas nama mereka dan bagaimana uang mereka dibelanjakan - untuk menjelaskan kepada mereka kegiatan umum dan kebijakan Departemen mereka . Kedua, kewajiban untuk memperjelas kepada warga negaranya, hak dan kewajiban warga negarasebagaimana diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya - hal ini penting untuk penyelenggaraan yang efisien dan adil, serta untuk warga sendiri
11	Janowski, Tomasz; Pardo, Theresa A .; Davies, Jim (2012)	Jaringan jaringan yang dipilih dari makalah yang diserahkan ke Konferensi Internasional ke-5 tentang Teori dan Praktik Pemerintahan Elektronik, ICEGOV2010, yang diadakan di Beijing, Cina, Oktober 2010. Kasus-kasus tersebut meliputi bidang-bidang: pencarian lintas-domain dan pengambilan ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum informasi (Yu, Taduri, Kesan, Lau, & Law, masalah ini); pengembangan layanan dan tata kelola interoperabilitas (Klischewski & Askar, masalah ini); adopsi TIK yang efisien dalam sistem peradilan (Andrade & Joia, masalah ini); pengukuran dan kematangan portal pengadaan elektronik (Concha & Porrúa, masalah ini); batas-batas pembagian dan integrasi informasi (Yang, Zheng, &Pardo, masalah ini); manajemen proses bisnis dan implementasi kebijakan (Gong & Janssen, masalah ini); evolusi portalinternet pemerintah daerah (Almazan & Gil-Garcia, masalah ini); penyampaian layanan publik elektronik olehtelecenter pedesaan (Naik, Joshi, & Basavaraj, edisi ini); partisipasi politik melalui internet (Nam, masalah ini); layanan publik elektronik untuk pekerja petani

		<p>migran (Wang, masalah ini); konsep jaringan dalam penelitian Administrasi Publik (Isett et al., 2011; Knox, Savage, & Harvey, 2006): Metafora - konsep jaringan tidak melekat dalam subjek studi tetapi melihat subjek sebagai jaringan membawa lebih banyak kejelasan dan pemahaman untuk itu, misalnya partisipasi politik sebagai jaringan warga yang berinteraksi satu sama lain dan dengan perwakilan terpilih mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah (Nam, masalah ini); Metode - diterapkan sebagai abstraksi, konsep jaringan menyediakan model komputasi, teknik, dan alat untuk diterapkan pada subjek studi, misalnya penggunaan Arsitektur Berorientasi Layanan berbasis jaringan untuk membantu implementasi interoperabilitas antar pemerintah memfasilitasi pengembangan layanan publik elektronik sebagai layanan web berbasis XML (Klischewski & Askar, edisi ini); dan Utilitas - konsep jaringan mengacu pada organisasi agenotonom tetapi berinteraksi yang secara kolektif mengejar tujuan bersama, misalnya pemerintah daerah memberikan layanan public ke pedawargapedesaan melalui telecenter milik swasta (Naik et al., masalah ini).</p>
12	<p>Kalseth, Jorid; Rattsø, Jørn (1995)</p>	<p>Fungsi permintaan untuk administrasi diperkirakan untuk otoritas lokal Norwegia, dengan menekankan anggaran total per kapita, ukuran populasi dan variabel sosiodemografi yang mempengaruhi komposisi layanan lokal. Fungsi permintaan menjadi dasar analisis variasi penggunaan sumber daya administratif di antara otoritas. Pendekatan metodologis terinspirasi oleh studi produktivitas industri manufaktur yang mendefinisikan batas 'praktik terbaik' yang ditentukan oleh pihak berwenang dengan pengeluaran administratif per kapita terendah mengingat karakteristik lokal. Administrasi minimum yang disyaratkan berfungsi sebagai patokan untuk perkiraan pengeluaran administrasi yang berlebihan sekitar 20%. I. Pendahuluan Ukuran dan pertumbuhan administrasi publik menjadi perhatian dalam banyak konteks kami, ukuran populasi merupakan faktor yang berpotensi penting dalam menjelaskan administrasi pemerintah daerah. Asumsi standar yang dibahas oleh Mintzberg (1983) mengatakan bahwa unit yang besar lebih efisien daripada yang kecil - intensitas administrasi menurun dengan bertambahnya ukuran organisasi. Tiga argumen balasan relevan untuk otoritas lokal. Blau (1974) berpendapat bahwa kompleksitas dan koordinasi</p>

meningkat dengan ukuran, menyebabkan kekakuan birokrasi dan biaya. Oates (1988) memperkenalkan 'efek kebun binatang', di sini menyiratkan bahwa fungsi administratif baru ditambahkan di otoritas yang lebih besar. Ott (1980) menghubungkan kontrol pemilih atas administrasi lokal dan produksi layanan dengan ukuran populasi, dengan kota kecil memiliki keuntungan yang mungkin. Secara apriori, peran ukuran populasi masih menjadi pertanyaan terbuka. Pendekatan kami terinspirasi oleh analisis produktivitas standar industri swasta.

2. Belanja administrasi di pemerintah lokal Norwegia. Pengeluaran pemerintah daerah untuk administrasi berjumlah sekitar 10 tagihan. pemerintah daerah. Menurut perhitungan, 'administrasi pusat' dan administrasi sektoral darilimalayananutama(pendidikan,perawatankesehatan) untuk orang tua, layanan sosial, budaya dan infrastruktur) dapat dipisahkan. Definisi tersebut tidak mencakup semua kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai administrasi, karena beberapa administrasi dibuat di tingkat masing-masing institusi (sekolah, panti jompo dll). Di sisi lain, beberapa aktivitas yang termasuk dapat dianggap sebagai produksi jasa. Terlepas dari kekurangan ini, pengukuran administrasi yang dipilih tampaknya mewakili dasar perbandingan yang dapat diterima dan merupakan definisi yang digunakan dalam publikasi pemerintah. Belanja administrasi per kapita menunjukkan variasi yang kuat antara pemerintah daerah. Di kota-kota yang diteliti, pengeluaran bervariasi dari 1.500 NOK perkapita hingga di atas 6.000 NOK, dan porsi pengeluaran saat ini yang dikhususkan untuk administrasi bervariasi dari sekitar 10% hingga di atas 25%.

1 Menurut dokumentasi pada Tabel 2 (rata-rata pengeluaran perkapita), ukuran populasi jelas terlibat, dan kurva U diindikasikan. A i adalah belanja administrasi per kapita di sektor jasa i. Di administrasi pusat, semua pengeluaran bersifat administratif (jika administrasi pusat adalah sektor 1, $k_1 = 1$). Intensitas administrasi di sektor jasa, k_i , dapat bervariasi. Belanja administrasi per kapita menunjukkan variasi yang kuat antara pemerintah daerah.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

13	Kinder, T (2002)	Pendekatan Cies dalam teori jaringan aktor. Kritik ini menunjukkan bahwa pendekatan STC mengutamakan hasil tertentu dari proses perubahan dengan secara terpusat menampilkan maksud tujuan yang disadari dari para pendukung konstituen. Kritik ini ditujukan dalam proses perubahan Molina akan membutuhkan visi strategis yang jelas dan stabilitas kepemimpinan selama (mungkin) periode 10 tahun. Kuadran kegunaan menarik perhatian konstituen WWL ke pemetaan yang dalam dan kaya serta analisis proses-proses perubahan dengan memperhatikan persepsi dan keinginan yang berkembang untuk perubahan oleh pengguna layanan (dan pengguna layanan potensial) dan staf. Metodologi baru untuk terlibat dengan staf dan pengguna akan diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memanfaatkan ide desa inovatif.
14	Knowles, Ryan T .; Hawkman, Andrea M .; Nielsen, Sarah R. (2020)	Pelatih-guru studi sosial: Sebuah analisis kuantitatif yang membandingkan para Pembina dan non-Pembina tentang bagaimana / apa yang mereka ajarkan dan instruksi. Kami mencapai tujuan ini dengan menganalisis data guru sekolah menengah dari Studi Nasional tentang Status Studi Sosial (Passe & Fitchett, 2013), yang terdiri dari sampel guru studi sosial dari 44 negara bagian. Analisis data berfokus pada satu item dari survei tersebut yang menanyakan kepada para guru apakah mereka pernah melatih olahraga dalam setahun terakhir. Kami membandingkan tanggapan atas pertanyaan ini dengan demografi guru dan konteks sekolah, disiplin yang diajarkan, dan preferensi instruksional. Sebelum kita, Harap mengutip artikel ini sebagai: Knowles, R. T et al., Pelatih-guru studi sosial: Analisis kuantitatif yang membandingkan pelatih dan non- pelatih tentang bagaimana / apa yang mereka ajarkan, <i>The Journal of Social Studies Research</i> , https://doi.org/10.1177/004209591663016 .
15	Li, Bin; Tong, De; Wu, Yaying; Li, Guicai (2019)	Desa Shuiwei, Shenzhen, sebagai upaya perintis untuk meningkatkan permukiman informal menjadi perumahan publik, yang dapat kita pahami sebagai properti 'pencucian abu-abu' yang didukung pemerintah. 'Pencucian' seperti itu pertama-tama mencakup mekanisme formalisasi informal yang didukung pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah daerah

		<p>untuk memperkuat jaminan kepemilikan yang dirasakan oleh penduduk atas properti informal. Ini adalah mekanisme baru dari operasi pemerintah yang tidak dipertimbangkan dalam studi yang ada, yang terutama mengeksplorasi mekanisme non-pemerintah yang meningkatkan persepsi keamanan tenurial dan mekanisme pemerintah yang meningkatkan keamanan tenurial hukum. Mekanisme baru ini melibatkan 'surat resmi yang menggantikan sertifikat', 'Catatan pertemuan resmi' dan 'kunjungan dan pembinaan lokasi' sebagai pendekatan konkret untuk membebaskan pemerintah dari tanggung jawab yang terkait dengan bahaya hukum dan politik dengan pengakuan resmi, pengambilan tanggung jawab kolektif, dan peningkatan substansial pada infrastruktur. Pendekatan ini merupakan campuran dari prosedur formal, aktor formal dan elemen ilegal. Pengoperasian mekanisme baru ini didasarkan pada pengalihan hak guna dari penduduk desa ke lembaga pemerintah, SYLCL; Setelah peralihan ini, pemerintah kabupaten setempat dapat menyumbangkan sumber daya administratif yang besar untuk formalisasi informalitas informal yang didukung oleh pemerintah, sehingga memperkuat persepsi jaminan Apartemen Ningmeng.</p>
16	<p>Liu, Hongrui; Erdogan, Ayca; Lin, Royce; Tsao, HS Jacob (2020)</p>	<p>Dalam kebanyakan literatur redistricting, kedekatan ditangani melalui pemrosesan pasca-pengoptimalan. Banyak penulis mengusulkan model teoritis graf yang dimulai dengan graf nnode terkoneksi, yaitu graf kedekatan, dan bertujuan untuk menemukan partisi kompak dari graf tersebut ke beberapa graf terhubung sekaligus memastikan keseimbangan populasi (Bodin, 1973). Yang lain menggunakan metode metaheuristik untuk menemukan solusi untuk masalah districting. Bacao, Lobo, dan Painho (2005) mengembangkan algoritma genetika dan diterapkan pada masalah districting di Lisbon (Bacao et al., 2005). Forman dan Yue mengusulkan algoritma genetik berbasis Travelling Salesman Problem dan mengujinya pada masalah districting di beberapa negara bagian di AS (Forman & Yue, 2003). Ricca dan Simeone (2008) membandingkan kinerja dari empat heuristik pencarian lokal (simulasi anil, pencarian tabu, keturunan dasar, dan Algoritma Penerimaan Sarjana Lama) untuk redistricting politik</p>

		<p>sebagai masalah partisi grafik dengan kriteria tambahan seperti "pembagian yang adil" dan "sesuai batas administratif ". Sementara menegakkan batasan kedekatan dalam grafik tampak sederhana, yaitu mempertimbangkan tepi yang hanya ada jika dua node adalah tetangga geografis, memastikan hal ini pada grafik besar dengan banyak simpul menjadi tidak dapat dikerjakan secara komputasi. King, Jacobson, Sewell, dan Cho (2012) memperkenalkan "grafik geografis", yang menyediakan pendekatan baru untuk partisi grafik, dengan mempertimbangkan setiap simpul sebagai wilayah geografis. Dengan menggunakan dualitas grafik planar, penulis menunjukkan bahwa grafik geografis menghasilkan partisi yang layak dengan sangat efisien terlepas dari</p>
17	<p>López, Nuria Rueda; Milán García, Juan; Uribe Toril, Juan; de Pablo Valenciano, Jaime (2020)</p>	<p>Studi pada dasarnya menggunakan dua jenis metodologi berdasarkan pendekatan perbatasan (Worthington dan Dollery, 2000). Jenis pendekatan ini terdiri dari estimasi batas yang mewakili perilaku optimal, memperoleh ukuran efisiensi dengan membandingkan nilai yang diamati dari masukan dan keluaran dari setiap unit yang dianalisis dengan nilai optimal yang didefinisikan oleh perbatasan (Forsund et al., 1980; Lovell, 1993). Kelompok metodologi perbatasan pertama didasarkan pada penerapan model non-parametrik, terutama Data Envelopment Analysis (DEA) karena keuntungan dari fleksibilitas yang lebih besar dan asumsi yang tidak terlalu membatasi (Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984). Demikian pula, metode non-parametrik lain untuk mengukur efisiensi, seperti Free Disposal Hull e FDH e (Deprins et al., 1984) telah digunakan. Model FDH melonggarkan asumsi konveksitas model DEA dasar. Versi terkoreksi dari teknik sebelumnya melalui penerapan metode bootstrap (Simar dan Wilson, 2000, 2008) telah digunakan. Dalam karya lain yang lebih baru, model batas parsial seperti yang disebut order-m (Cazals et al., 2002) dan model efisiensi bersyarat telah digunakan (Daraio & Simar, 2005; Mastromarco &</p>

		<p>Simar, 2015). Indeks Produktivitas Malmquist (Caves et al., 1982) juga telah digunakan dalam penelitian lain untuk menganalisis perubahan indeks efisiensi dari waktu ke waktu. Kelompok studi kedua telah menerapkan model parametrik deterministik dan stokastik (Aigner et al., 1977; Meeusen dan Van den Broeck, 1977) dalam evaluasi efisiensi lokal. Terlepas dari teknik yang digunakan untuk evaluasinya, studi yang mengukur efisiensi dalam penyediaan layanan public.</p>
18	<p>Mah, Daphne Ngar Yin (2020)</p>	<p>Rencana Pembangunan Nasional 1962 sampai dengan 68 dan seluruh jangka waktu Rencana Nasional Kedua tahun 1970 sampai 74. Kebijakan kesehatan nasional yang berlaku selama pemerintahan adalah Kebijakan Pelayanan Perawatan Kesehatan Nasional tahun 1954. Fokus utama dari kebijakan tersebut adalah membuat layanan kesehatan dapat diakses oleh penduduk pedesaan yang dirugikan selama bertahun-tahun. Hal ini akan dicapai melalui pembentukan pusat kesehatan pedesaan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan petugas medis. Kebijakan tersebut juga menetapkan peran pemerintah daerah dalam pendanaan dan pemeliharaan layanan kesehatan yang terletak di pedesaan dengan dukungan juga dari pemerintah daerah (Scott-Emuakpor, 2010). Dengan demikian, meskipun harapan hidup adalah yang terendah selama masa administrasi, efisiensi adalah karena semakin banyak petugas kesehatan yang ditugaskan untuk menjadi kepala puskesmas di daerah pedesaan, kebutuhan akan beberapa petugas untuk mengambil peran yang kurang memenuhi syarat untuk mereka; misalnya, seorang perawat berpengalaman ditugaskan untuk memimpin sebuah klinik. Hal ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan efisiensi dana yang dialokasikan untuk HRH karena harapan hidup yang relatif lebih tinggi tercapai sementara tingkat pengeluaran yang sama masih dipertahankan oleh rezim. Selain itu, kolaborasi pemerintah daerah dalam mendanai layanan kesehatan pedesaan juga dapat memastikan systemcheckyang memadai</p>

19	Olanubi, Sijuola Orioye; Osode, Oluwanbepelumi Esther (2017)	<p>Seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bank Dunia mengukur tata kelola sebagai indeks dan menerbitkan datayang relevan. Bank Dunia bergerak melalui enam prinsip saat membuat indeks ini. Menurut Bank Dunia, jika partisipasi dan akuntabilitas di suatu negara, stabilitas politik, kualitas peraturan pemerintah, efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi dan supremasi hukum tinggi, maka GG didekati (Yıldırım, 2018). Dalam databaseWB, "Indeks Tata Kelola Dunia (GI)" diterbitkan setiap tahun untuk sekitar 200 negara (Bank Dunia, 2018). Indeks ini diterbitkan sejak tahun 1996 sebagai hasil sintesis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Indikator agregat ini menyatukan pandangan dari sejumlah besar inisiatif, warga negara dan pakar di negara industri dan berkembang (Bank Dunia, 2018). Indikator ini didasarkan pada lebih dari 30 sumber data individu yang dihasilkan oleh berbagai lembaga penelitian, lembaga think tank, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan sektor swasta (Yıldırım, 2018). 15 negara dengan IG Dunia tertinggi antara tahun 1996 dan 2017 tercantum dalamTabel 1. Tabel 1 dibuat dengan mengambil rata-rata indikator tata kelola setiap negara antara tahun 1996 dan 2017. 15 negara terpilih memiliki skor GI tertinggi. Semua negara dalam tabel ini berada di kelas negara maju. SkorGI di Turki dibandingkan dengan negara-negara ini. Dengan demikian, akan ditentukan status Turki saat ini dalam hal GG. Hasil Tabel 1 menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GG berbanding lurus dengan tingkat pembangunan negara. Negara-negara dalam Tabel 1 ini lebih berhasil daripada negara lain dalam hal stabilitas ekonomi, hukum, keamanan dan politik. Penerapan pendekatan manajemen strategis oleh lembaga pemerintah dan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan langkah penting dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip GG. Dalam konteks ini, GDLRC yang merupakan lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan pengelolaan lahan dan kadaster di Turki. GDLRC berupaya untukmempertimbangkan prinsip-prinsip GG dalam penyampaian layanan ini dalam kerangka pendekatan manajemen strategisnya. Pada bagian studi ini, pertama- tama, akan disebutkan betapa pentingnya GDLRC dalam hal pengelolaan lahan dan kadaster di Bab 3. 1. Kemudian, kontribusi GDLRC kepada GG</p>
----	--	---

		<p>dalam pengelolaan lahan dan kadaster akan disebutkan pada Bab 3.2. keamanan dan stabilitas politik. Penerapan pendekatan manajemen strategis oleh lembaga pemerintah dan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan langkah penting dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip GG. Dalam konteks ini, GDLRC yang merupakan lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan pengelolaan lahan dan kadaster di Turki. GDLRC berupaya untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip GG dalam penyampaian layanan ini dalam kerangka pendekatan manajemen strategisnya. Pada bagian studi ini, pertama-tama, akan disebutkan betapa pentingnya GDLRC dalam hal pengelolaan lahan dan kadaster di Bab 3. 1. Kemudian, kontribusi GDLRC kepada GG dalam pengelolaan lahan dan kadaster akan disebutkan pada stabilitas politik. Penerapan pendekatan manajemen strategis oleh lembaga pemerintah dan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan langkah penting dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip GG. Dalam konteks ini, GDLRC yang merupakan lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan pengelolaan lahan dan kadaster di Turki. GDLRC berupaya untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip GG dalam penyampaian layanan ini dalam kerangka pendekatan manajemen strategisnya. Pada bagian studi ini, pertama-tama, akan disebutkan betapa pentingnya GDLRC dalam hal pengelolaan lahan dan kadaster di Bab 3. 1. Kemudian, kontribusi GDLRC kepada GG dalam pengelolaan lahan dan kadaster akan disebutkan pada Bab 3. Penerapan pendekatan manajemen strategis oleh lembaga pemerintah dan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan langkah penting dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip GG.</p>
20	Polat, Zeynel Abidin; Alkan, Mehmet (2020)	<p>Informasi kepada warga melalui situs web. Hanya beberapa kantor di Indonesia yang telah mencapai jenjang kedua dan ketiga seperti SIMTAP (Sistem Informasi Manajemen saTu AtaP = Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu) yang dikembangkan oleh beberapa Pemerintah Daerah. Riset lain yang dilaporkan Dahlan² bahwa dari 64 website, 45,2% diklasifikasikan dalam kategori informasional, 50% responsif, dan 4,8% transaksi berdasarkan kategori versi</p>

Bank Dunia. Berdasarkan lima tahapan kematangan e-Gov versi UNDP, 55% website pemerintah Indonesia berada pada tahapan pertama yaitu Emerging, 28% pada tahapan Enhanced, dan 17% pada tahapan Interactive. Hanya satu e_gov lokal dalam tahap Transaksi tetapi tidak ada di tahap terakhir Terhubung. Sedangkan Hermana dan Silfianti⁵ mengemukakan bahwa terdapat perbedaan peringkat webmetric antara pemerintah daerah di Jawa dan di luar Jawa. Di Jawa, situs web pemerintah kota atau pemerintah kabupaten lebih dominan daripada situs provinsi, tetapi di luar Jawa yang berlaku sebaliknya. Selain itu, Hermana et al 4 menemukan bahwa semua jenis situs web pemerintah di luar Jawa memberikan informasi dan layanan yang lebih rendah daripada situs web pemerintah daerah di Jawa. Selain itu, terdapat kesenjangan digital dalam penyampaian fitur dan transparansi keuangan. Semua laporan di atas berbicara tentang status perkembangan e-Gov secara internal di Indonesia. Untuk melihat perbandingan AgusPrahono dan Elidjen / Procedia Ilmu Komputer 59 (2015) 27 - 33 29 komunikasi antar instansi pemerintah (G2G) 7. Juga, menggunakan e-Gov untuk mencapai transparansi, Di Jawa, situs web pemerintah kota atau pemerintah kabupaten lebih dominan daripada situs provinsi, tetapi di luar Jawa yang berlaku sebaliknya. Selain itu, Hermana et al 4 menemukan bahwa semua jenis situs web pemerintah di luar Jawa memberikan informasi dan layanan yang lebih rendah daripada situs web pemerintah daerah di Jawa. Selain itu, terdapat kesenjangan digital dalam penyampaian fitur dan transparansi keuangan. Semua laporan di atas berbicara tentang status perkembangan e-Gov secara internal di Indonesia. Untuk melihat perbandingan AgusPrahono dan Elidjen / Procedia Ilmu Komputer 59 (2015) 27 - 33 29 komunikasi antar instansi pemerintah (G2G) 7. Juga, menggunakan e-Gov untuk mencapai transparansi, Di Jawa, situs web pemerintah kota atau pemerintah kabupaten lebih dominan daripada situs provinsi, tetapi di luar Jawa yang berlaku sebaliknya. Selain itu, Hermana et al 4 menemukan bahwa semua jenis situs web pemerintah di luar Jawa memberikan informasi dan layanan yang lebih rendah daripada situs web pemerintah daerah di Jawa.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

21	Prahono, Agus; Elidjen (2015)	<p>Studi intervensi ini meneliti apakah pelatih olahraga pemuda dapat dilatih dalam mengadopsi gaya pembinaan yang mendukung kebutuhan (yaitu, dukungan dan struktur otonomi) untuk kepentingan motivasi dan keterlibatan otonom atlet muda. Peserta terdiri dari 43 pelatih (33 laki-laki, 10 perempuan) dan 326 atlet muda (221 laki-laki, 105 perempuan), aktif dalam 12 tim atau olahraga individu. Pelatih olahraga secara acak baik untuk kontrol atau kondisi intervensi. Pelatihan ini melibatkan lintasan lokakarya yang mencakup empat sesi tentang bagaimana menggabungkan gaya pembinaan yang (lebih) membutuhkan dukungan. Adapun gaya pembinaan yang dilaporkan sendiri oleh pelatih, hasil pemodelan bertingkat mengungkapkan efek positif pada dukungan dan kontrol otonomi pada posttest, dan efek tambahan pada struktur dan kontrol dari pre-test hingga follow-up (yaitu, 4 bulan kemudian) dibandingkan dengan pelatih dalam kondisi kontrol. Adapun laporan atlet, pemodelan multilevel menunjukkan bahwa atlet pelatih dalam intervensi, relatif terhadap mereka yang terlibat dalam kelompok kontrol, menganggap pelatih mereka lebih otonomi-mendukung, lebih terstruktur, dan kurang semrawut dari pra-ke posttest, dengan ini Efeknya menjadi lebih jelas bagi atlet olahraga tim. Lebih lanjut, atlet pelatih dalam kelompok intervensi dilaporkan lebih termotivasi secara mandiri dan lebih terlibat dibandingkan dengan pelatih dalam kelompok kontrol. Secara keseluruhan, temuan saat ini menunjukkan bahwa pelatih olahraga dapat menjadi lebih terampil dalam mengadopsi gaya pembinaan yang mendukung kebutuhan, untuk kepentingan motivasi dan keterlibatan otonom atlet.</p> <p>1.1 .1. Dampak motivasi dari pembinaan yang mendukung kebutuhan Semua pelatih muda ingin atlet mereka sangat termotivasi dan membutuhkan dengan mendukung otonomi, menyediakan struktur, dan menjadi hangat dan terlibat dalam interaksi dengan atlet mereka. Ketika menjadi otonomisportif, pelatih mengadopsi sikap terbuka, ingin tahu dan hormat yang memelihara inisiasi diri dan kebebasan psikologis atlet (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Seorang pelatih yang mendukung otonomi memberikan pilihan yang berarti, menawarkan alasan untuk keputusan dan permintaan, mengakui pikiran, perasaan dan pendapat atlet, dan</p>
----	-------------------------------	---

		<p> mendukung inisiatif mereka dalam proses pembelajaran mereka (Conroy & Coatsworth, 2007; Mageau & Vallerand, 2003). Ketika menawarkan struktur, pelatih mengambil pengembangan atlet yang berorientasi pada proses sebagai titik awal, dengan demikian memberikan informasi dan umpan balik, mengekspresikan kepercayaan, dan menguraikan pedoman yang jelas dan konsisten sehingga atlet muda merasa efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste & Soenens, 2015). Akhirnya, sikap mendukung keterkaitan ditandai dengan rasa hormat yang tulus, penerimaan tanpa syarat, dan kepedulian terhadap atlet Anda sebagai pribadi (Vansteenkiste & Soenens, 2015). Pelatih dapat mendukung kebutuhan atlet akan keterkaitan dengan selalu tersedia, dengan menunjukkan perhatian yang tulus untuk kesejahteraan mereka - baik di dalam maupun di luar lapangan - dan dengan menawarkan kenyamanan jika ada yang salah, sehingga atlet mengalami rasa kedekatan dan perhatian (Deci & Ryan, 2000; Sparks, Dimmock, Whipp, Lonsdale, 015) </p>
22	<p> Reynders, Bart; Vansteenkiste, Maarten; Van Puyenbroeck, Stef; Aelterman, Nathalie; De Backer, Maarten; Delrue, Jochen; De Muynck, Gert Jan; Fransen, Katrien; Haerens, Leen; Broek, Gert Vande (2019) </p>	<p> Apa yang dievaluasi sebagai desentralisasi pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan pedesaan mungkin juga reformasi pemerintah daerah untuk pembangunan kabupaten yang lebih baik. Tantangan dalam menganalisis upaya-upaya tersebut adalah jangan sampai disibukkan dengan politik desentralisasi yang selalu ada. Artikel ini membahas reformasi pemerintah lokal di Zimbabwe yang telah disamakan dengan desentralisasi pemerintah pusat: Penggabungan dua otoritas lokal pedesaan yang berbeda secara ras. Pelajaran dari pengalaman Zimbabwe memiliki implikasi untuk upaya serupa di Afrika Selatan pascapartheid. Distribusi tanah penting karena peran utama pertanian skala besar dalam ekonomi tunai pertanian negara. Sektor pertanian komersial skala besar menyumbang sekitar 75% dari hasil pertanian yang dipasarkan negara itu. Memang, Lebih dari 40% cadangan devisa tahunan negara itu berasal dari industri pertanian, dengan sekitar 85% di antaranya berasal dari produk yang dihasilkan melalui pertanian skala besar. Pertanian skala besar juga mempekerjakan lebih dari 25% pen </p>

		<p>erima upah di Zimbabwe. Namun, diperkirakan enam atau tujuh dari setiap 10 warga Zimbabwe memperoleh mata pencaharian dari pertanian tanah komunal. Untuk memberikan indikasi apa arti angka-angka ini di tingkat rumah tangga, sebuah survei sampel di salah satu kabupaten yang dikunjungi untuk penelitian artikel ini menemukan bahwa pendapatan rumah tangga tahunan rata-rata di antara petani komunal adalah sekitar Z \$ 1,100, sedangkan pendapatan rumah tangga rata-rata di mapan. area pertanian komersial di distrik yang sama lebih dari Z\$400.000.5 Dengan latar belakang itu, sekarang kita beralih ke penyediaan barang dan jasa publik lokal oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah pedesaan suram.</p>
23	Roe, Emery M. (1995)	<p>Partisipasi dalam rapat proyek; tinjauan dokumen dan hasil</p> <p>a; telepon konferensi dua kali seminggu yang terkait dengan setiap Living Lab; pertemuan tatap muka dengan para ahli dari tim analisis risiko dan analisis data; serta partisipasi dalam lokakarya dengan petugas penargetan. Selain itu, serangkaian wawancara khusus dilakukan dengan pakar bea cukai dari bea cukai Belgia dan Belanda untuk memahami proses saat ini dan perkembangan analisis data. Sesi demonstrasi oleh penyedia DA eksternal dihadiri di Lab Hidup untuk mengikuti perkembangan DA dan kemajuan LL. Beberapa sesi khusus diatur dengan para ahli tentang pengukuran kinerja untuk memahami prioritas, perhatian, dan pertimbangan yang terlibat dalam pengukuran kinerja dan hasil DA. Pengumpulan data yang terkait dengan dua Living Labs lainnya dilakukan melalui pertemuan proyek umum di mana hasil dari Living Labs ini dibahas, melalui wawancara individu dan peninjauan hasil proyek utama. Lampiran A memberikan gambaran umum tentang para ahli utama yang berinteraksi dengan kami dalam konteks penelitian ini. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan dalam analisis iteratif. Pada iterasi kedua, kami pertama kali menerapkan model diperpanjang ke LL Belanda, sekarang dengan mempertimbangkan tampilan proses. Hal ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembangunan kemampuan analisis data sebelum LL Belanda dan untuk lebih memahami LL Belanda sebagai siklus baru dalam proses tersebut. Selanjutnya, kami</p>

		<p>melakukan pengumpulan data putaran kedua dan analisis data di Belgian Living Lab. Kerangka kerja tambahan yang dihasilkan berdasarkan putaran iterasi kedua dengan Living Labs berubah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya daripada versi awal. Namun, berdasarkan interaksi dengan Living Labs, batasan lain dari framework menjadi terlihat.</p>
24	<p>Rukanova, Boriana; Tan, Yao Hua; Slegt, Micha; Molenhuis, Marcel; Van Rijnsoever, Ben; Migeotte, Jonathan; Labare, Mathieu LM; Plecko, Krunoslav; Caglayan, Bora; Persingkat, Gavin; Van Der Meij, Otis; Posting, Sucanne (2020)</p>	<p>Pemantauan keaksaraan: Bukti dari Nigeria Utara dan Ghana 'Praktik terbaik' berbasis bukti dari konteks sumber daya tinggi telah memotivasi beberapa program keaksaraan kelas awal di negara berkembang untuk mempekerjakan spesialis keaksaraan swasta sebagai pelatih bagi guru, bukan daripada membangun pembinaan ke dalam deskripsi pekerjaan dari pelaku sistem yang ada, seperti pengawas sekolah. Studi ini mengajukan pertanyaan, dapatkah pelaku sistem pendidikan dengan tanggung jawab pengawasan untuk sekolah, yang belum tentu spesialis literasi, menjadi pelatih literasi yang efektif? Menggunakan data sekunder dari program membaca di Nigeria, kami menggunakan kerangka kerja regresi efek tetap untuk mengevaluasi keefektifan relatif dari ahli materi pelajaran eksternal dan pelaku sistem pada hasil belajar dan mengajar. Kami menemukannya di Nigeria, aktor sistem sama efektifnya dalam meningkatkan implementasi program dan kinerja guru seperti halnya pakar membaca yang direkrut dari luar. Data kualitatif dari model pembinaan yang kontras di Nigeria dan Ghana memberikan wawasan tentang alasan mengapa pengawas sekolah mungkin cocok untuk pembinaan. agenda pendidikan internasional secara global diskusi seputar pengembangan profesional guru, pembinaan guru, dan pengawasan dan pengawasan guru menjadi semakin canggih. Pertanyaan utama yang tersisa terkait dengan bagaimana mekanisme dukungan guru dapat disistematisasi dan diskalakan di negara-negara berpenghasilan rendah. Secara khusus, siapa yang paling baik ditempatkan untuk memberikan pelatihan berkelanjutan, pembinaan, dan pengawasan kepada guru, meningkatkan kemungkinan perubahan perilaku guru yang berkelanjutan? Haruskah para aktor ini selalu</p>

		<p>menjadi ahli pedagogis? Dapatkah pengawas sekolah yang ada mengambil peran sebagai pelatih dan mentor dan tetap mempertahankan peran pengawasan tanpa mengorbankan kualitas? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, yang belum diteliti secara sistematis dalam konteks negara berpenghasilan rendah, memiliki implikasi terhadap kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, dan keberlanjutan jangka panjang miliaran dolar investasi dalam literasi kelas awal dan program pembelajaran. Tinjauan baru-baru ini terhadap program keaksaraan dalam konteks sumber daya rendah menunjukkan bahwa strategi pembinaan sering kali didasarkan pada "praktik terbaik" dari konteks sumber daya tinggi (Jaringan Membaca Global, 2019). Dalam studi ini, kami secara empiris menyelidiki masalah ini menggunakan desain metode campuran untuk memeriksa dua pendekatan yang kontras untuk dukungan dan pengawasan guru yang tertanam dalam program keaksaraan dalam konteks Afrika Barat pelaksana program keaksaraan kelas dalam konteks.</p>
25	<p>Smiley, Anne; Cao, Yvonne; Moussa, Wael; Dooley, Brian; Sullivan, Jane (2020)</p>	<p>Kinerja pemerintah elektronik dari administrasi perlindungan lingkungan di provinsi Anhui, China Malin Song*, Sekolah Statistik dan Matematika Terapan YouyiGuan, Universitas Keuangan dan Ekonomi Anhui, Bengbu 233030, Cina Studi ini mengevaluasi kinerja e-government dari administrasi perlindungan lingkungan di 16 kotaprovinci Anhui berdasarkan analisis situs web mereka. Untuk tujuan ini, studi menggunakan model super- efficiency slacks-based measure (SBM) berdasarkan tiga indikator level pertama: tingkat partisipasi publik, kualitas layanan situs web, dan kepuasan publik. Peningkatan indikator-indikator ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dan kualitas layanan dari situs web e-government ini sangat konsisten. Dengan kata lain, semakin besar partisipasi masyarakat, semakin baik penilaian kualitas layanan, begitu pula sebaliknya. Namun, analisis kinerja yang komprehensif menunjukkan bahwa hanya 4 dari 16 situs web e-government yang berkinerja di garis depan yang efisien, sedangkan sisanya tidak efisien. Oleh karena itu, operasi e-government di provinsi Anhui harus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi. Harap mengutip</p>

		artikel ini sebagai: Song, M., Guan, Y., Kinerja pemerintah elektronik dari administrasi perlindungan lingkungan diprovinsi Anhui, Cina, Technol.
26	Anda, Lie; Li, Yurui; Wang, Rui; Pan, Haozhi (2020)	<p>Temuan utama dapat diringkas sebagai berikut: (1) Melengkapi penilaian urbansuburban dan lebih obyektif untuk evaluasi manfaat pembangunan lahan bangun. Adanya perbedaan manfaat antara kabupaten pinggiran kota dengan kawasan pusat kota mencerminkan bahwa perencanaan tata ruang kota multikor memiliki pedoman yang terbatas dalam aspek efisiensi penggunaan lahan. Tingkat manfaat lahan pembangunan secara keseluruhan di pinggiran kota tidak meningkat, dan hanya kabupaten di</p> <p>porospembangunanyangmemilikibeberapakeuntungan.(2) Pola perkembangan tata guna lahan di daerah pinggiran kota dapat memfasilitasi penilaian intensitas penggunaan lahan dan efektivitas pengelolaan lahan. Model perluasan marginal di sebagian besar distrik pinggiran kota menunjukkan bahwa wilayah pinggiran kota besar masih dalam tahap pengembangan penggunaan lahan yang tidak intensif. Efisiensi penggunaan lahan tidak meningkat dengan meningkatnya urbanisasi, terutama di daerah pinggiran kota bagian dalam. Pasokan kontraktif dari lahan terbangun dan alokasi lahan stok yang dioptimalkan harus menjadi arah kebijakan utama pengelolaan lahan terbangun</p>
27	Surujlal, J. (2016)	<p>Menggambar berdasarkan teori penentuan nasib sendiriMenggambar berdasarkan teori penentuan nasib sendiri(SDT; Deci & Ryan, 2002a; Ryan & Deci, Olafsen, & Ryan, 2017) dan teori perubahan yang disengaja (ICT, Boyatzis, 2008), kami menawarkan model konseptual integratif untuk mendefinisikan apa yang merupakan efek pelatih kepemimpinan. Kami mengusulkan seorang Pembina kepemimpinan yang efektif memungkinkan perubahan berkelanjutan pada bagian dari pemimpin yang sedang dibina. Kami menerapkan SDT dan ICT untuk menjelaskan dinamika motivasi, difasilitasi oleh pembina kepemimpinan, yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan yang efektif. Secara khusus, kami menegaskan bahwa perubahan berkelanjutan pemimpin dicapai ketika Pembina kepemimpinan bekerja untuk memenuhi tiga kebutuhan inheren manusia dalam pemimpin (otonomi, keterkaitan, dan kompetensi) melalui penemuan diri yang difasilitasi dan tindakan yang bertujuan di pihak pemimpin.</p>

		<p>Kepuasan terhadap kebutuhan tersebut menimbulkan motivasi dan tindakan selanjutnya untuk berubah. Kami menyajikan proposisi untuk mengundang penelitian pembinaan lebih lanjut dan membahas bagaimana model konseptual yang diusulkan berlaku untuk praktik pembinaan kepemimpinan. Riset dan praktik pembinaan kepemimpinan Sejalan dengan pertumbuhan penelitian dan praktik pembinaan, jumlah pola pikir de-learning dan keinginan untuk meningkatkan kapabilitas pemimpin mereka. 3 Dalam makalah ini kami mengacu pada pembinaan kepemimpinan (sebagai lawan dari istilah lain untuk pembinaan) karena fokus kami adalah pada pembinaan yang terjadi dengan mereka yang berada di posisi kepemimpinan dalam organisasi. Di grup inilah para Pembina eksternal dipekerjakan atau Pembina internal dipekerjakan untuk membantu mengembangkan para pemimpin. Meskipun demikian, kami yakin banyak konsep yang kami kemukakan tentang pembinaan kepemimpinan dapat diterapkan secara setara untuk jenis pembinaan lainnya (misalnya, pembinaan eksekutif, pembinaan manajerial, pembinaan rekan, pembinaan kehidupan, dll.).</p>
28	Yuan, Liu; Xi, Chen; Xiaoyi, Wang (2012)	<p>Mengevaluasi kesiapan situs portal pemerintah di China untuk mengadopsi prinsip-prinsip administrasi publik kontemporer Liu Yuan, Chen Xi *, Sekolah Manajemen Wang Xiaoyi, Universitas Zhejiang, China E-government saat ini sedang diterapkan di seluruh dunia. Sebagian besar lembaga pemerintah sekarang memiliki ruangnya sendiri di internet, sehingga memungkinkan warga untuk menemukan informasi dan, semakin, terlibat dalam layanan e-government (Pieterse, Ebbers, & van Dijk, 2007). E-government adalah produk gabungan dari teknologi informasi dan prinsip-prinsip baru administrasi publik. Ini telah menjadi elemen kunci dari rekonstruksilayanan publik yang dilakukan oleh banyak negara pada abad ke-21. Akibatnya, situs web portal pemerintah telah menjadi salah satu saluran terpenting untuk penyampaian layanan publik dan interaksi warga-pemerintah, dan kinerja portal ini pada akhirnya mencerminkan keefektifan platform e-government suatu negara. Oleh karena itu, pendekatan sistematis untuk evaluasi kinerja dan pengelolaan portal ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja manajerial dan tingkat implementasi e-government secara keseluruhan. Sejumlah studi telah dilakukan di negara</p>

		maju Prinsip administrasi publik tradisional Layanan sederhana: hanya publisitas informasi, tidak ada interaksi Prinsip administrasi berbasis pasar
29	Wang, Jiaoe; Du, Delin; Huang, Jie (2020)	<p>Mengevaluasi kesiapan situs portal pemerintah di China untuk mengadopsi prinsip-prinsip administrasi publik kontemporer Liu Yuan, Chen Xi *, Sekolah Manajemen Wang Xiaoyi, Universitas Zhejiang, China E-government saat ini sedang diterapkan di seluruh dunia. Sebagian besar lembaga pemerintah sekarang memiliki ruangnya sendiri di internet, sehingga memungkinkan warga untuk menemukan informasi dan, semakin, terlibat dalam layanan e-government (Pieterse, Ebbers, & van Dijk, 2007). E-government adalah produk gabungan dari teknologi informasi dan prinsip-prinsip baru administrasi publik. Ini telah menjadi elemen kunci dari rekonstruksi layanan publik yang dilakukan oleh banyak Negara pada abad ke-21. Akibatnya, situs web portal pemerintah telah menjadi salah satu saluran terpenting untuk penyampaian layanan publik dan interaksi warga-pemerintah, dan kinerja portal ini pada akhirnya mencerminkan keefektifan platform e-government suatu negara. Oleh karena itu, pendekatan sistematis untuk evaluasi kinerja dan pengelolaan portal ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja manajerial dan tingkat implementasi e-government secara keseluruhan. Pemerintah dan akademisi memiliki kepedulian yang sama untuk melayani permintaan masyarakat secara efisien dan efektif, termasuk pengembangan perangkat lunak e-government. Kemitraan pemerintah-akademisi dapat menjadi pendekatan yang berharga untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan ini. Namun, institusi pemerintah dan akademis cenderung memiliki agenda dan struktur organisasi dan manajerial yang sangat berbeda, yang dapat menghambat keberhasilan proyek kolaboratif tersebut. Untuk mengidentifikasi pendekatan yang efektif untuk mengatasi hambatan kolaborasi, kami secara sistematis mempelajari kasus proyek portal Perangkat Lunak Publik Brasil, kolaborasi pemerintah-akademisi selama 30 bulan yang menggunakan praktik Perangkat Lunak Bebas / Libre / Sumber Terbuka dan metode tangkas untuk manajemen proyek, mengembangkan platform yang</p>

30	<p>Pemerintah dan akademisi memiliki kepedulian yang sama untuk melayani permintaan masyarakat secara efisien dan efektif, termasuk pengembangan perangkat lunak e- government. Kemitraan pemerintah-akademisi dapat menjadi pendekatan yang berharga untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan ini. Namun, institusi pemerintah dan akademis cenderung memiliki agenda dan struktur organisasi dan manajerial yang sangat berbeda, yang dapat menghambat keberhasilan proyek kolaboratif tersebut. Untuk mengidentifikasi pendekatan yang efektif untuk mengatasi hambatan kolaborasi, kami secara sistematis mempelajari kasus proyek portal Perangkat Lunak Publik Brasil, kolaborasi pemerintah-akademisi selama 30 bulan yang, menggunakan praktik Perangkat Lunak Bebas / Libre / Sumber Terbuka dan metode tangkas untuk manajemen proyek, mengembangkan platform yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks pemerintah Brasil. Kami mengumpulkan informasi dari laporan pengalaman dan pengumpulan data dari repositori dan wawancara untuk mendapatkan kumpulan praktik yang berkontribusi pada keberhasilan kolaborasi. Dalam makalah ini, kami menjelaskan bagaimana analisis data mengarah pada identifikasi serangkaian tiga keputusan tingkat tinggi yang didukung oleh penerapan sembilan praktik terbaik yang meningkatkan kinerja proyek dan memungkinkan pelatihan profesional dari seluruh tim. ing (Charmaz, 2008), strategi inti dari Teori Beralas (Glaser dan Strauss, 1999; Corbin dan Strauss, 2014). Ini adalah pendekatan penelitian yang banyak digunakan dalam rekayasa perangkat lunak (Waterman et al., 2015; Stol et al., 2016; Santos et al., 2016; Hoda dan Noble, 2017). Kami menjelaskan secara rinci strategi analisis data kami di Bagian 4.2.4. Gambar. 1 merangkum alur kerja investigasi kami, yang memiliki as</p> <p>Dalam makalah ini, kami menjelaskan bagaimana analisis data mengarah pada identifikasi serangkaian tiga keputusan tingkat tinggi yang didukung oleh penerapan sembilan praktik terbaik yang meningkatkan kinerja proyek dan memungkinkan pelatihan profesional dari seluruh tim. ing (Charmaz, 2008), strategi inti dari Teori Beralas (Glaser dan Strauss, 1999; Corbin dan Strauss, 2014). Ini adalah pendekatan penelitian yang banyak digunakan dalam rekayasa perangkat lunak (Waterman et al., 2015; Stol et al., 2016; Santos et al., 2016; Hoda dan Noble.</p>
----	---

Tabel ini dipergunakan untuk melihat penelitian terdahulu dan bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Dari beberapa jurnal di atas maka dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada jurnal-jurnal terdahulu. Pada penelitian ini peneliti berfokus melakukan penelitian mengenai pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam membina administrasi pemerintah desa. sedangkan jurnal-jurnal yang ada di atas berfokus meneliti mengenai masalah administratif pada suatu desa.

2.2 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6).

Menurut Fayol (2016; 13) yang dimaksud dengan teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol (2016; 11) melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu;

- 1) Aktivitas organisasi,
- 2) Fungsi atau tugas pimpinan,
- 3) Prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol (2016; 13) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.

4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.

14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut Morrow sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis.

Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Robbins, teori administrasi meliputi :

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.

4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

2.3 Organisasi Publik

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula.

Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu.

Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Menurut Ulum (2009: 9) karakteristik organisasi sektor publik atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan adalah sebagai berikut;

- 1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- 2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- 3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Sedangkan menurut Christensen (2015: 6) menguraikan 3 karakteristik utama sektor publik yang intisarinya sebagai berikut:

- 1) Pemimpin tertinggi organisasi publik seperti Presiden atau Perdana Menteri dipilih melalui pemilu. Sehingga organisasi sektor publik yang ada di masyarakat memiliki tanggung jawab politik. Terlepas dari apakah organisasi publik dekat atau jauh dari kepemimpinan politik terdapat

pemimpin politik yang terpilih secara demokratis di atas organisasi yang memiliki akuntabilitas tinggi. Berbeda dengan perusahaan swasta, yang bertanggung jawab kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham, organisasi publik bertanggung jawab kepada legislatif yang dipilih juga oleh rakyat melalui pemilu. Organisasi publik merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan dan menghadapi tantangan yang berbeda dengan sektor swasta. Sistem pemerintahan dipengaruhi oleh sistem politik masyarakat tidak seperti organisasi swasta yang terbatas pada orang – orang tertentu. Oleh karena itu organisasi sektor publik memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan organisasi sektor publik.

- 2) Model organisasi publik berbeda dari banyak organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik memiliki model organisasi multifungsi. Model Organisasi multifungsi ini membuat organisasi sektor publik sangat rentan terhadap kritik. Ini dikarenakan dalam menjalankan organisasinya memerlukan banyak pertimbangan yang sangat sulit, seperti politik, partisipasi oleh pihak yang terkena dampak, penentuan sumber daya manusia, sensitivitas pengguna, transparansi, publisitas dan wawasan proses pengambilan keputusan, prediktabilitas, perlakuan yang sama, ketidakberpihakan, netralitas, kualitas layanan, kemandirian profesional, loyalitas politik, efisiensi dan efektivitas. Dalam menjalankan fungsinya pemerintahan tidak dapat membuat aturan dengan mudah karena harus sesuai dengan konstitusi dan disetujui oleh rakyat berbeda dengan sektor

swasta yang tidak terlalu sulit dalam membuat aturan yang digunakan diorganisasinya

- 3) Sebagian besar organisasi publik berbeda dari organisasi swasta dalam bahwa mereka tidak beroperasi dalam pasar bebas dan kompetitif. Meskipun ada pembentukan BUMN yang ikut berkompetisi memperlihatkan ciri ini, tetapi hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa argumen. Salah satu jenis argumen organisasi publik adalah ide bahwa pasar (sektor swasta) memiliki kapasitas terbatas untuk menangani masalah-masalah sehingga diperlukan intervensi organisasi publik. Selain itu organisasi sektor publik juga memperbaiki atau mengatasi masalah yang diciptakan oleh pasar, dimana pasar tidak mampu menyelesaikannya.

Menurut Nordiawan (2006: 2) organisasi publik menjadi berbeda dan unik karena memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial
- b) Dimiliki secara kolektif oleh pihak public
- c) Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan
- d) Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan operasi didasarkan pada consensus.

2.4 Pemerintahan Desa

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berartimenyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu government yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa government tidak selalu memiliki makna pemerintahan.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Inu Kencana Syafi'ie (2005: 20) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya

menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adon, (2015:111)

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: (Hanif, 2011:73)

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.5 Administrasi Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2002;19) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan Pemerintahan sendiri/otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lainnya.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai kewenangan :

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pentingnya pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan administrasi desa dikarenakan tanpa administrasi tidak mungkin suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan.

Dalam pengertian sempit Adminisrtasi desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan naskah dan segala pencatatanya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan.

Tabel 2.2

Perbedaan Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Administrasi Desa

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	ADMINISTRASI DESA
<p>Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintah desa mampu mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Widjaja, (2002; 88).</p>	<p>Administrasi Desa sebagai alat penggerak pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa. Administrasi Desa meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum yang terdiri dari: Buku Keputusan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Kekayaan Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Aparat Desa, dan buku Tanah Desa. 2. Administrasi Kependudukan meliputi: Buku penduduk, Buku Penduduk sementara, Buku perkembangan penduduk, Buku kartu keluarga, Buku tanda penduduk, Buku jumlah penduduk. 3. Administrasi Keuangan Desa meliputi: Buku anggaran Desa, buku Kas umum, Buku Kas pembantu Wijaya, (2016; 88).

2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia

Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga.

Perlu dihayati bahwa manajemen bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba. Walaupun manajemen hanya merupakan “alat atau wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa definisi sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sehingga sangat penting suatu organisasi mengelolah sumber daya manusia yang ada dengan baik sesuai dengan kebutuhan agar tercapainya daya saing suatu perusahaan.

Wilson Bangun (2012: 6) mengemukakan manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas – aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Oleh karena itu, manajemen

sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Schuler dalam buku Edy Sutrisno (2020: 4) mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam member kontribusi bagi tujuan - tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2004: 8) ilmu manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi - segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengadilan. Proses ini terdapat dalam fungsi bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karna sumber daya manusia dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka

berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan dengan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola (*manage*) sumber daya manusia.

Unsur sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan, dengan demikian fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang berhubungan dengan tenaga manusia.

2.7 Pembinaan

Menurut Ismail (2001; 154). Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir (masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna.

Selanjutnya Saydam (2000; 408) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Ismail (2001; 167-168) Menyatakan bahwa tata cara membina adalah;

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif rendah. dalam menggunakan media cetak hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan, menterjemah, dan menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan. Yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan.
3. Dengan melakukan petunjuk/demonstrasi. Petunjuk atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seseorang instruktur tentang sesuatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Menurut Hanif (2005; 133) tujuan pembinaan adalah;

- a. Diarahkan untuk menjamin tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk keairahan bekerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pancasila, UUD 1945 dan Negara.
- d. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
- e. Diarahkan pada penyaluran penyebaran dan pemamfaatan pegawai.
- f. Diarahkan kepada pembimbing sistem karir dan pembinaan prestasi kerja.

Miftah juga menjelaskan salah satu teknik perilaku organisasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah pembinaan organisasi atau dikenal dalam literatur Pembinaan menurut Thoha (2003:182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.

Dengan demikian, pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. Itulah sebabnya usaha ini merupakan bagian dari ilmu perilaku organisasi.

Menurut Thoha (2003:182) pembinaan organisasi adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan

organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi dengan mempergunakan ilmu prilaku.

Kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang dilakukan menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah menyangkut pengembangan dan pelebagaan organisasi sehingga dapat berjalan optimal serta kegiatan pengarah organisasi dalam menjalankan usaha organisasi. Pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan.

Sementara itu untuk terlaksananya suatu pembinaan maka Ndraha (2001: 168) mengatakan melalui:

- 1) Pendidikan
- 2) Latihan (penataran, upreading, kursus, dan sebagainya)
- 3) Lokakarya (workshop)
- 4) Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium dan sebagainya)
- 5) Penerangan
- 6) Pertemuan, diskusi, musyawarah
- 7) Pers, radio dan TV
- 8) Literatur dan sebagainya
- 9) Intruksi-intruksi
- 10) Teladan.

Menurut Santoso dalam Aprianida; (2016.10)

- a) Perencanaan
- b) Bimbingan
- c) Pengarahan
- d) Pelatihan

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu pembinaan yang dilakukan oleh camat terhadap pemerintahan desa dapat dilakukan dengan cara;

- 1) Perencanaan

Pemerintahan desa harus membuat, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

- 2) Bimbingan

Selain memeberikan pembinaan pihak kecamatan juga harus memberikan bimbingan bagi pemerntahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.

- 3) Pengarahan

Camat juga berkewajiban memberikan arahan dan sosialisasi mengenai peraturan yang menyangkut desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, untuk mengetahui

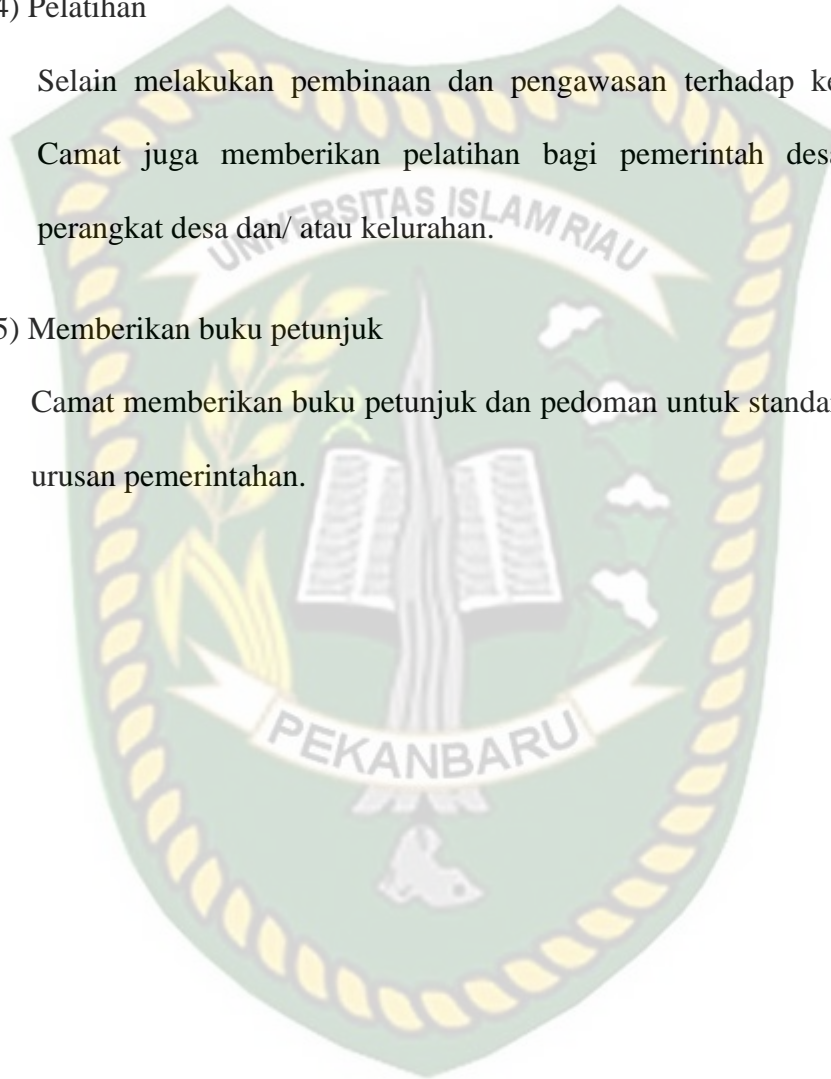
sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat.

4) Pelatihan

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga memberikan pelatihan bagi pemerintah desa terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan.

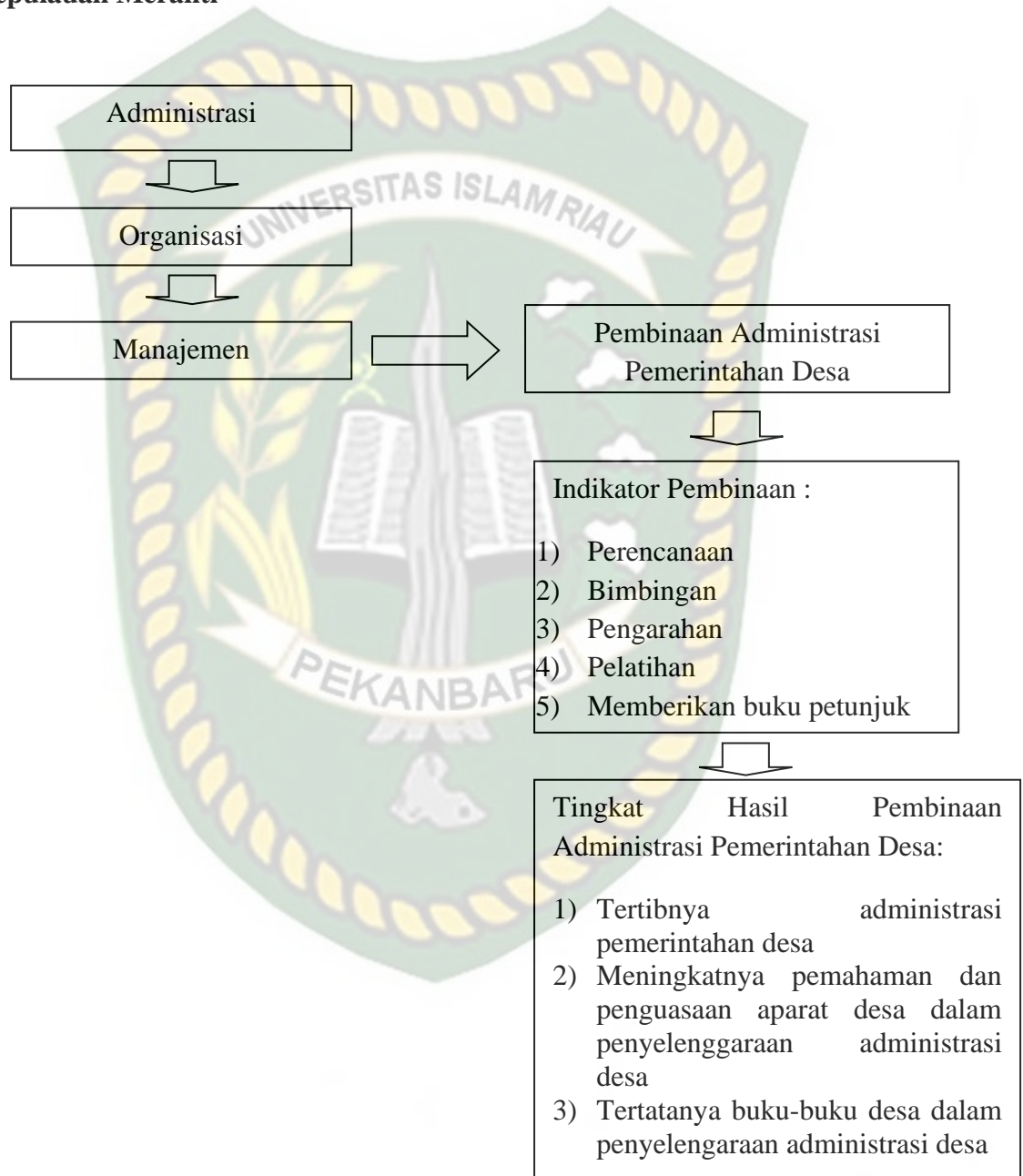
5) Memberikan buku petunjuk

Camat memberikan buku petunjuk dan pedoman untuk standar pelaksanaan urusan pemerintahan.



2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 : Operasioal variabel penelitian tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber. Modifikasi Penulis, 2020 dari teori Santoso, 1995

Pembinaan administrasi pemerintahan desa oleh camat tebing tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti harus memenuhi indikator-indikator pembinaan yang terdapat pada keterangan gambar di atas.

2.9 Konsep Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang ada pada penelitian ini. Maka dirumuskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas dan semangat kerja Aparat Desa yang dilakukan oleh Camat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota.
- c. Yang dimaksud dengan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

- e. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa melakukan perencanaan terhadap administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Bimbingan yang dimaksud dengan pembimbingan adalah upaya-upaya yang dilakukan Camat dalam memberikan pelatihan, pengarahan, petunjuk, mengadakan evaluasi dan rapat kerja terhadap Pemerintahan Desa.
- g. Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan memberikan Arahan, Instruksi, serta menerima keluhan, memberikan penjelasan kepada pemerintahan desa
- h. Pelatihan adalah pihak camat memeberikan pelatihan terhadap pemerintahan desa dalam melakukan penyelenggaraan administrasi desa
- i. Pemberian pedoman disini memberikan pedoman-pedoman berupa juknis, perda dan buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan, menjelaskan pedoman tersebut kepada aparat desa ataupun mendatangkan tenaga ahli menunjuki cara pendataan, pengisian, dan pelaporan kegiatan administrasi desa.

2.10 Operasional Variabel

Untuk mendapatkan penelitian yang sempurna, variabel penelitian diperlukan agar pengambilan dan pembahasan data terarah. Sebagai parameter dari variabel yang diteliti akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Operasional Variabel Penelitian Tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p>Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan itu bias berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.</p> <p>Thoha (2003;182)</p>	<p>Pembinaan Adminisrtasi Pemerintahan Desa</p>	<p>1. Perencanaan</p> <p>2. Bimbingan</p> <p>3. Pengarahan</p> <p>4. Pelatihan</p> <p>5. Memberikan Buku Petunjuk</p>	<p>a. Penyusunan menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang</p> <p>b. Penyusunan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu</p> <p>a. Adanya Pelatihan</p> <p>b. Adanya Rapat kerja</p> <p>a. Pemberian Arahan</p> <p>b. Pemberian Instruksi</p> <p>a. Menjelaskan isi Pedoman</p> <p>b. Mendatangkan tenaga ahli</p> <p>a. Memberi Buku-buku</p> <p>b. Memberi Buku juknis</p>

a. Pengarahan

Penyusunan menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang yang menjadi tujuan Pemerintahan Kecamatan untuk Desa yang tertib administrasi desa. Adapun hal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kecamatan sudah melakukan penyusunan kegiatan untuk melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa

b. Bimbingan

Adanya pelatihan dan juga rapat kerja dalam upaya memberikan bimbingan kepada kepala desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa. Dalam hal ini sudah dilaksanakan rapat kerja dalam waktu 3 bulan sekali.

c. Pengarahan

Pengarahan telah dilakukan dalam hal ini seperti melakukan apel setiap senin pagi dan juga melakukan inspeksi mendadak di desa-desa secara bergiliran.

d. Pelatihan

Pelatihan telah dilakukan oleh instansi terkait seperti penyusunan renstra desa, rkp desa, apbd desa, dan juga pengelolaan dan pertanggung jawaban bumdes dalam hal ini kecamatan memfasilitasi untuk penghubung dari instansi terkait ke desa-desa.

e. Memberikan Buku Petunjuk

Kecamatan telah memberikan buku-buku petunjuk administrasi pemerintahan desa ke desa-desa seperti buku juklak, juknis dan lain sebagainya



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang artinya hasil penelitian menggambarkan gejala/perilaku atau kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut W. J. S. Poerwadarminta (1986: 649), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.

Sedangkan menurut Nasution (2003: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya mengamati orang pada lingkungan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang sekitarnya.

Selanjutnya Riduwan (2009:60), menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau bisa disebut dengan metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa sosial yang tidak bersifat eksakta.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sesap pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan peneliti tertarik melakukan penelitian Hal ini disebabkan letak desa sesap secara geografis berada jauh kecamatan tebing tinggi dan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dan memiliki pengetahuan administrasi yang masih kurang disebabkan kebanyakan masyarakat desa sesap merupakan suku akit.

3.3 Informan Penelitian

Informan yaitu orang yang memberikan informasi secara partisipatif tentang topik pembahasan penelitian. Adapun subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel tentang Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.

No	Nama Informan	Jabatan
1	Rayan Pribadi, S.H.	Camat
2	Jumri, S.Pdi	Kepala Desa
3	Altofiah, S.Pd	Kasi Pemerintahan
4	Nursodik, S.Pd.	Ketua BPD
5	Jumlah	-

Sumber Data Olahan Lapangan

3.4 Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam yang di pilih peneliti dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2007:152), purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan oleh peneliti dari responden melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di pilih penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam kegiatan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Husaini & Purnomo, (2011: 52)

- b. Wawancara (*interview*), ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Sugiyono, (2007:157)
- c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat di tafsirkan. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah Deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci mengenai pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Visi Dan Misi Kecamatan Tebing Tinggi

VISI : Menjadikan Kecamatan TebingTinggi sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani dan sebagai pusat pemerintahan yang prima dan terdepan.

MISI : 1. Memajukan Kecamatan Tebing Tinggi melalui perdagangan yang maju dan unggul.
2. Memajukan Kecamatan Tebing Tinggi melalui usaha kecil dan menengah yang berbasis kepada masyarakat melalui kelompok usaha kecil.
3. Akan melaksanakan system pelayanan pemerintahan melalui pelayanan prima, cepat dan terdepan.

MOTTO : PELAYANAN CEPAT, RAMAH, DAN MENYENANGKAN.

4.2 Kependudukan Kecamatan Tebing Tinggi

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Jumlah Penduduk | : 59.309 Orang |
| a. Laki – Laki | : 29.939 Orang |
| b. Perempuan | : 29.370 Orang |
| c. Jumlah Kepala Keluarga | : 15.170 KK |
| d. Jumlah Penduduk Miskin | : 6.328 KK |
| e. Kewarganegaraan; | |

1. Warga Negara Indonesia

a. Laki – Laki	: 29.939 Orang
b. Perempuan	: 29.370 Orang
c. Jumlah	: 59.309 Orang

2. Warga Negara Asing

a. Laki – Laki	: - Orang
b. Perempuan	: - Orang
c. Jumlah	: - Orang

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Aliran Kepercayaan

a. Islam	: 44.907 Orang
b. Kristen	: 997 Orang
c. Katolik	: 588 Orang
d. Hindu	: 9 Orang
e. Budha	: 10.745 Orang
f. Konghucu	: 2.048 Orang
g. Penganut Kepercayaan lainnya	: 15 Orang

3. Jumlah Penduduk Menurut Umur

a. Kelompok Umur

Umur 0 – 4 Tahun	: 5.311 Orang
Umur 5 – 9 Tahun	: 4.987 Orang
Umur 10 – 14 Tahun	: 5.220 Orang
Umur 15 – 19 Tahun	: 5.225 Orang
Umur 20 – 24 Tahun	: 5.633 Orang

Umur 25 – 29 Tahun	: 4.503 Orang
Umur 30 – 34 Tahun	: 5.079 Orang
Umur 35 – 39 Tahun	: 4.132 Orang
Umur 40 – 44 Tahun	: 3.349 Orang
Umur 45 – 49 Tahun	: 3.749 Orang
Umur 50 – 54 Tahun	: 3.025 Orang
Umur 55 – 59 Tahun	: 3.083 Orang
Umur 60 – 64 Tahun	: 2.286 Orang
Umur 65 – 69 Tahun	: 2.056 Orang
Umur 70 – 74 Tahun	: 1.001 Orang
Umur 75 Tahun keatas	: 670 Orang
Total	: 59.309 Orang

b. Kelompok Tenaga Kerja Menurut Umur

1. 20 – 29 Tahun	: 10.133 Orang
2. 30 – 39 Tahun	: 9.211 Orang
3. 40 – 49 Tahun	: 7.098 Orang
4. 50 – 59 Tahun	: 6.108 Orang
5. 60 Tahun ketasa	: 6.013 Orang

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a. Lulusan Pendidikan Umum

1. Penduduk belum sekolah	: 7.358 Orang
2. Penduduk Tamat SD / Sederajat	: 13.560 Orang
3. Penduduk tamat SLTP / Sederajat	: 10.856 Orang

5. Penduduk Tamat SLTA / Sederajat	: 18.205 Orang
6. Penduduk Tamat Perguruan Tinggi	: 6.114 Orang
7. Penduduk Buta Huruf	: 706 Orang
8. Penduduk Putus Sekolah	: 2.239 Orang
b. Lulusan Pendidikan Khusus	
1. Pondok Pesantren	: 697 Orang
2. Madrasah	: Orang
3. Pendidikan Keagamaan	: Orang
4. Sekolah Luar Biasa	: Orang
5. Kursus / Keterampilan	: Orang
5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
a. Petani	: 844 Orang
b. Nelayan	: 335 Orang
c. Industri besar / sedang	: 932 Orang
d. Pengrajin / industry kecil	: 299 Orang
d. Buruh industri	: 1.029 Orang
e. Buruh bangunan	: 10.724 Orang
f. Buruh kebun	: 701 Orang
g. Pedagang	: 5.625 Orang
h. Pengangkutan	: 2.358 Orang
i. Pegawai negeri sipil	: 1.785 Orang
j. TNI	: 63 Orang
k. POLRI	: 57 Orang

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| l. Pangsiunan | : | 511 Orang |
| m. Peternak | : | 630 Orang |
| n. Lainnya | : | 6.424 Orang |
6. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas
- | | | |
|--------------|---|-------------|
| a. Lahir | | |
| 1. Laki Laki | : | 605 Orang |
| 2. Perempuan | : | 593 Orang |
| 3. Jumlah | : | 1.198 Orang |

4.3 Jumlah Perangkat Kecamatan

- | | | |
|---|---|----------|
| a. Camat | : | 1 Orang |
| b. Sekretaris Kec / Sekretaris Lurah | : | 5 Orang |
| c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan | : | 9 Orang |
| d. Kepala Sub Bagian | : | 2 Orang |
| e. Kepala Seksi Kecamatan dan Kelurahan | : | 11 Orang |
| f. Staf Pegawai | : | 16 Orang |
| g. Staf Honor | : | 56 Orang |

4.4 Pembinaan RT Dan RW di Kecamatan Tebing Tinggi

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 1. Jumlah RT | : | 213 Orang |
| 2. Jumlah RW | : | 74 Orang |
| 3. Jumlah Pengurus RT | : | - Orang |
| 4. Jumlah Pengurus RW | : | - Orang |

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai penggerak atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam mencapai berbagai keberhasilan pembangunan.

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi

vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan.
- 2) Bimbingan.
- 3) Pengarahan
- 4) Pelatihan.
- 5) Pemberian Buku Petunjuk.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya yang memberikan pembinaan itu adalah camat dan stafnya sedangkan yang dibina itu adalah aparat pemerintahan desa. Adapun hasil penelitian penulis tentang tugas camat dalam membina administrasi pemerintahan desa Sesap di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan pada indikatornya yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah rancangan atau cara-cara yang akan dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan yang dilakukan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan administrasi desa kepada pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi. Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan dalam perencanaan.

1. Penyusunan Menentukan Apa Yang Ingin Dicapai Dimasa Yang Akan Datang

Penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dalam melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa terhadap perangkat desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 Jam 09.00 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan:

“Pihak kecamatan telah membuat perencanaan kegiatan apa saja yang akan dilakukan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa bagi pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi”.

Ungkapan diatas, bahwa kecamatan telah melakukan perencanaan terhadap pembinaan administrasi desa seperti melakukan bimbingan teknis dan pengarahan di saat pelaksanaan apel pagi serta apel sore.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa,;

“Pihak Kecamatan memang sudah melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan pembinaan namun sampai saat ini perencanaan

yang dilakukan pihak kecamatan belum terealisasi dengan baik atau sesuai harapan”

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan memang sudah melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan desa namun belum dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

”Pihak kecamatan selalu membuat rencana kegiatan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa”.

Berdasarkan ungkapan di atas pihak kecamatan memang sudah melakukan perencanaan kegiatan yang dilakukan secara mingguan maupun bulanan namun belum dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Desa Sesap mengatakan bahwa; *“Pihak Kecamatan tidak memberi apa saja rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa. Biasanya pemberitahuan mengenai rencana krja atau sosialisasi baru diketahui oleh pemerintah desa setelah menerima surat undangan kegiatan dari pihak kecamatan”.*

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan belum memberi apa saja rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa kepada pihak desa dalam meningkatkan administrasi pada lingkungan pemerintah desa.

Dari hasil penelitian sejauh ini penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam administrasi desa masih kurang melibatkan pihak pemerintah desa yang berada di kecamatan Tebing Tinggi sehingga hal ini menyebabkan banyak rencana yang telah dibuat masih kurang realisasinya kepada pihak pemerintah desa dalam melakukan administrasi desa.

Penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan bertujuan untuk meningkatkan serta pengembangan kerjakepala desa atau kelurahan sangatlah diharapkan dapat berperan juga dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada Pemerintah desa atau kelurahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Menurut

Albert Waterson perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Pengelolaan administrasi pada Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan terbentuknya administrasi pemerintahan desa yang baik, maka akan terbentuk tata pemerintahan yang baik. Pembangunan berjalan lancar dan kehidupan kemasyarakatan akan tertib.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

2. Penyusunan Kegiatan Untuk Mencapai Suatu Tujuan Tertentu Dalam Waktu Tertentu

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dalam melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa terhadap perangkat desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-

10-2020 Jam 09.00 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu membuat rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa bagi pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan selalu membuat rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa bagi pemerintahan desa yang ada di seluruh desa yang berada pada kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa,;

“Pihak Kecamatan tidak memberi tahu apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa. Biasanya pemberitahuan mengenai rencana kerja atau sosialisasi baru diketahui oleh pemerintah desa setelah menerima surat undangan kegiatan dari pihak kecamatan”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan belum memberi apa saja rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa seperti apa rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

”Pihak kecamatan selalu membuat rencana kegiatan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan selalu membuat rencana kegiatan baik secara mingguan atau bulanan dalam melakukan pembinaan administrasi desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak Kecamatan tidak memberi tahu apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa. Biasanya pemberitahuan mengenai rencana kerja atau sosialisasi baru diketahui oleh pemerintah desa setelah menerima surat undangan kegiatan dari pihak kecamatan”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan belum memberi apa saja rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan administrasi pemerintahan desa seperti apa rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejauh ini penyusunan kegiatan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam administrasi desa masih kurang melibatkan pihak pemerintah desa yang berada di kecamatan Tebing Tinggi Sehingga hal ini menyebabkan banyak rencana yang telah dibuat masih kurang realisasinya kepada pihak pemerintah desa dalam melakukan administrasi desa.

Penyusunan kegiatan dilakukan oleh pihak desa bertujuan untuk meningkatkan serta pengembangan kerja kepala desa atau kelurahan sangatlah di harapkan dapat berperan juga dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang di bebankan kepada Pemerintah desa atau kelurahan.

Adapun tujuan dan maksud Penyusunan kegiatan Desa

- 1) Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa.
- 2) Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera.

Selain tujuan diatas, adapun maksud yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai

tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.

- 2) Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- 3) Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.

Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. Dengan adanya bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada serta bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan agar tujuan bisa tercapai seperti yang diinginkan. Untuk melakukan bimbingan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Adanya Pelatihan

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib administrasi desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 Jam 09.00 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pemberian pelatihan mengenai administrasi pemerintahan desa kadang-kadang diberikan jika dianggap perlu dan adanya anggaran guna memberikan pelatihan bagi pemerintahan desa”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan kadang-kadang memberikan pelatihan kepada pemerintahan desa jika dianggap perlu dan adanya anggaran untuk memberikan pelatihan kepada pihak pemerintahan desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;;

“Pihak Kecamatan ada memberikan pelatihan mengenai administrasi desa. Namun pemberian pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala”.

Dari ungkapan di atas pihak desa mengatakan bahwa pihak kecamatan ada memberikan pelatihan mengenai administrasi desa. Namun pemberian pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak kecamatan dalam memberikan pelatihan kepada pihak pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

”Pihak kecamatan memang terkadang ada memberikan pelatihan mengenai administrasi desa terhadap pihak pemerintahan desa. Namun pemberian pelatihan tersebut baru bisa dilaksanakan bila terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemberian pelatihan kepada pihak pemerintahan desa”.

Dari ungkapan di atas pihak kecamatan memang terkadang ada memberikan pelatihan mengenai administrasi desa terhadap pihak pemerintahan desa. Namun pemberian pelatihan tersebut baru bisa dilaksanakan bila terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemberian pelatihan kepada pihak pemerintahan desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pemberian pelatihan mengenai administrasi desa memang terkadang ada diberikan kepada pemerintah desa yang terkadang lebih diikuti oleh pihak desa saja”.

Dari ungkapan di atas pihak desa mengatakan bahwa pihak kecamatan ada memberikan pelatihan mengenai administrasi desa. Namun pemberian pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejauh ini program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjurus pada peningkatan tata administrasi pemerintahan desa, sementara pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa karena itu merupakan tugas sehari-hari dan yang menentukan prospek otonomi desa adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya maka dari itu diperlukan pelatihan terhadap penyelenggara pemerintah desa.

Padahal pelatihan bisa meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintah karena dengan diadakannya pelatihan-pelatihan akan lebih meningkatkan pemahaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah itu bisa tercapai karena diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Pelatihan (*training*) merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan keterampilan. Pelatihan juga dimaksudkan memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Kegiatan pelatihan sangat penting karena bermamfaat guna menambah pengetahuan atau keterampilan terutama bagi yang bekerja langsung dengan pengadministrasian. Bagi yang sudah bekerja bukan berarti pelatihan tidak penting, malah pelatihan bermamfaat untuk mengasah kemampuan kembali.

Pelatihan diberikan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan.

Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tatacara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mrengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam

mengolah kegiatan sesuai dengan profesidalam melayani kepentingan masyarakat.

Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya paham.

2. Adanya Rapat kerja

Adanya rapat kerja yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan pihak desa sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan administrasi desa. Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah desa bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat desa satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Rapat kerja dengan pihak pemerintah desa ada dilakukan. Namun tidak terlalu sering dilakukan”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa rapat kerja dengan pihak pemerintah desa ada dilakukan terkait dengan pembahasan mengenai administrasi pemerintahan. Namun tidak terlalu sering dilakukan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;
“Pihak kecamatan jarang melakukan Rapat Kerja, padahal itu semua sangat menunjang kinerja dan memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan jarang melakukan Rapat Kerja, padahal itu semua sangat menunjang kinerja dan memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Rapat kerja memang tidak terlalu sering dilakukan oleh pihak kecamatan disebabkan karena karena berbagai hal”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan memang tidak terlalu sering dilakukan oleh pihak kecamatan disebabkan karena karena berbagai hal.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Rapat kerja yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melibatkan pihak BPD dalam membahas mengenai masalah administrasi desa jarang dilakukan”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa rapat kerja yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melibatkan pihak BPD dalam membahas mengenai masalah administrasi desa jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian rapat kerja yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan mengundang seluruh perangkat desa dalam meningkatkan kemampuan dalam administrasi desa sangat diperlukan. Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desa sebenarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilai kinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

Salah satu tujuan rapat kerja adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparatur pemerintah desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan

akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.

Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desasebanarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengannya bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilaikinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

c. Pengarahan

Pengarahan merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai konsultasi dapat dinilai melalui sub indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Memberikan Pengarahan

Pengarahan yang diberikan oleh Camat sangat dibutuhkan oleh aparat desa terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa karena dengan pengarahan bisa melaksanakan tugas lebih. Pemerintah kecamatan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap penyelenggaraan administrasi desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayan Pribadi selaku Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.52 wib dikantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pengarahan-pengarahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemberian pengarahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa,;

“Pihak Kecamatan ada memberikan pengarahan mengenai administrasi desa. Namun pemberian pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak Kecamatan ada memberikan pengarahan mengenai administrasi desa. Namun pemberian pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

”Pihak kecamatan memang terkadang ada memberikan pengarahan mengenai administrasi desa terhadap pihak pemerintahan desa. Namun

pemberian pelatihan tersebut baru bisa dilaksanakan bila terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemberian pelatihan kepada pihak pemerintahan desa”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan memang terkadang ada memberikan pengarahannya mengenai administrasi desa terhadap pihak pemerintahan desa. Namun pemberian pelatihan tersebut baru bisa dilaksanakan bila terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemberian pelatihan kepada pihak pemerintahan desa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pemberian pengarahannya mengenai administrasi desa memang terkadang ada diberikan kepada pemerintah desa yang terkadang lebih diikuti oleh pihak desa saja”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemberian pengarahannya mengenai administrasi desa memang terkadang ada diberikan kepada pemerintah desa yang terkadang lebih diikuti oleh pihak desa saja.

Berdasarkan hasil penelitian pemberian pengarahannya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam pelaksanaan administrasi desa bagi perangkat desa masih kurang maksimal dilakukan. Hal ini disebabkan pemberian pengarahannya tidak dilakukan secara berkala atau berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan terhadap setiap desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Pemberian pengarahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa memang menjadi tugas pemerintah kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah desa bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada.

Pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan pada perangkat desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan desa.

Pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan memantau kegiatan aparat desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi.

Selain pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, Pihak kecamatan juga melakukan pengawasan yang dilakukan dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan seksi tata pemerintahan.

Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa dalam menjalankan pemerintahan, melayani dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan setiap tahun.

Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Kecamatan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas dibidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan.

2. Pemberian Intruksi

Pemberian intruksi yang dilakukan oleh pihak kecamatan pada pemerintah desa sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas administrasi desa. Untuk mengetahui bagaimana pemberian intruksi yang dilakukan oleh Kecamatan Tebing Tinggi pemerintahan desa Sesap berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayan Pribadi selaku Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.52 wib dikantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu memberikan intruksi yang disampaikan secara langsung kepada kepala desa maupun dilakukan secara tertulis guna meningkatkan pelayanan dalam administrasi desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan selalu memberikan intruksi yang disampaikan secara langsung kepada kepala desa maupun dilakukan secara tertulis guna meningkatkan pelayanan dalam administrasi desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa,;

“Pihak Kecamatan ada memberikan intruksi mengenai administrasi desa yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tertulis”.

Dari ungkapan di atas diketahui Pihak Kecamatan ada memberikan intruksi mengenai administrasi desa yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tertulis.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

”Pihak kecamatan memang selalu membrikan intruksi guna meningkatkan pelayanan dalam administrasi desa. Pemberian intruksi bisa dilakukan secara langsung oleh camat kepada kepala desa dan perangkat desa maupun dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada setiap desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan memang selalu membrikan intruksi guna meningkatkan pelayanan dalam administrasi desa. Pemberian intruksi bisa dilakukan secara langsung oleh camat kepada kepala desa dan perangkat desa maupun dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada setiap desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pemberian intruksi mengenai administrasi desa memang ada dilakukan secara langsung maupun tertulis”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemberian intruksi mengenai administrasi desa memang ada dilakukan secara langsung maupun tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemberian intruksi yang dilakukan oleh Camat dalam meningkatkan pelayanan dan pengetahuan perangkat desa mengenai administrasi desa sudah maksimal dilakukan oleh pihak kecamatan dalam meningkatkan

pelayanan administrasi desa di setiap desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Pemberian intruksi yang dilakukan camat kepada pihak desa sangat diperlukan. Adapun bentuk intruksi yang bisa dilakukan oleh camat adalah sebagai berikut;

- 1) Intruksi secara lisan
- 2) Intruksi secara tertulis

Pemberian intruksi yang dilakukan oleh camat kepada pihak desa sangat diperlukan guna meningkatkan pelayanan yang diberikan dalam administrasi desa oleh pihak desa kepada masyarakat. Pemberian intruksi ini juga dianggap sebagai peringatan atau salah satu bentuk rekomendasi yang harus dijalankan oleh pihak desa.

Tata kelola administrasi desa sesap belum semaksimal terealisasi sesuai apa yang di harapkan. Karena ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan. Dimana Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, dan fungsi yang masih kaku. Inipun di pengaruhi oleh perekrutan perangkat desa yang tidak profesionalitas dan masih belum cakap dalam tugas dan fungsinya oleh kepala desa itu sendiri. Ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten maupun kecamatan tidak intens melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa sebagai eksekutor administrasi desa. Kemudian kesadaran pribadi dari masing-masing perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun didapati bahwa ternyata psikologi kepala desa yang terlalu anti kritik, dan keras dalam

melaksanakan instruksi, sehingga perangkat desa terkesan takut melakukan aktifitas atau tidak terlalu berani untuk berkreasi

d. Pelatihan

1. Memberikan Petunjuk Teknis

Bahwa Pemberian Pedoman yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayan Pribadi selaku Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.52 wib dikantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu memberikan buku petunjuk teknis mengenai administrasi desa kepada setiap pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi. Pemberian buku teknis tersebut dilakukan baik pemberian dari pemerintah daerah kabupaten atau provinsi atau dari pihak pemerintah pusat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan selalu memberikan buku petunjuk teknis mengenai administrasi desa kepada setiap pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi. Pemberian buku teknis tersebut dilakukan baik pemberian dari pemerintah daerah kabupaten atau provinsi atau dari pihak pemerintah pusat.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Sejauh ini pemerintah kecamatan selalu memberikan buku petunjuk mengenai administrasi desa baik berupa Juknis maupun peraturan daerah sebagai pegangan dalam menjalankan tugas yang mana diharapkan bisa membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemerintah kecamatan selalu memberikan buku petunjuk mengenai administrasi desa baik berupa Juknis maupun peraturan daerah sebagai pegangan dalam menjalankan tugas yang mana diharapkan bisa membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan ada memberikan buku Juknis atau Peraturan daerah bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan ada memberikan buku Juknis atau Peraturan daerah bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian buku Jukni atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan administrasi desa telah dilakukan oleh Camat dalam meningkatkan pelayanan dan pengetahuan perangkat desa mengenai administrasi desa. Sehingga diharapkan pihak pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Pemberian pelatihan petunjuk teknis kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desasesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan

petunjuk teknis dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan.

Dalam pemberian pelatihan petunjuk teknis tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat.

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib administrasi desa tersebut.

Memberikan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masih banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dapat pelaksanaan tugas pemerintah desa.

2. Mendatangkan Tenaga Ahli

Dalam pemberian pedoman berupa peraturan-peraturan ataupun sosialisasi peraturan-peraturan bisa dilakukan dengan mendatangkan tenaga ahli untuk menjelaskan perihal tersebut, agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap pedoman yang diberikan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa; *“Terkadang pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli jika dibutuhkan untuk menjelaskannya masalah yang berkaitan dengan administrasi desa seperti masalah kependudukan, yang bekerjasama dengan Dinas kependudukan. Jika tidak diperlukan maka cukup dengan pihak desa menanyakan kepada pihak kecamatan mengenai kendala atau hambatan yang ditemui pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat”*.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan terkadang memang ada mendatangkan tenaga ahli jika dibutuhkan untuk menjelaskannya masalah yang berkaitan dengan administrasi desa seperti masalah kependudukan, yang bekerjasama dengan Dinas kependudukan. Jika tidak diperlukan maka cukup dengan pihak desa menanyakan kepada pihak kecamatan mengenai kendala atau hambatan

yang ditemui pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli guna memberikan arahan dan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa. Namun tenaga ahli yang didatangkan juga tidak selalu sering ya dalam setahun ada 3 atau 2 kali dalam mendatangkan tenaga ahli”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli guna memberikan arahan dan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli bila dianggap hal tersebut dibutuhkan. Namun mendatangkan tenaga ahli dalam memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait mengenai administrasi desa tidak selalu tiap bulan dilakukan mengingat anggaran yang dimiliki oleh pihak kecamatan tidak begitu besar sehingga mengenai kendala atau hambatan yang ditemui pemerintah

desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan terkadang mendatangkan ahli dalam memberikan pelatihan bagi pihak pemerintahan desa bila dianggap perlu dan terdapatnya anggaran.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli guna memberikan arahan dan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan memang ada mendatangkan tenaga ahli guna memberikan arahan dan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tenaga ahli yang didatangkan guna meningkatkan pengetahuan bagi pemerintah desa dalam administrasi desa sangat diperlukan. Namun nampaknya hal tersebut belum maksimal dilakukan oleh Camat mengingat anggaran yang dimiliki oleh pihak kecamatan tidak terlalu besar dalam mendatangkan tenaga ahli guna memberikan sosialisasi dalam meningkatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan administrasi desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Adanya pelatihan dengan mendatangkan ahli bertujuan agar pihak desa bisa lebih pihak desa mampu bekerja lebih baik lagi, karena mereka adalah ujung tombak dalam rangka memberdayakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa agar lebih maju.

Pelatihan merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Pelatihan adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan.

Pelatihan dengan mendatangkan ahli diharapkan dapat lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*current job oriented*). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (*unplanned change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*).

e. Pemberian Buku Petunjuk

Dalam menyelenggarakan sebuah tanggung jawab memang diperlukan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman bisa berupa Buku, undang-undang, juknis dan lain-lain. Untuk melihat bagaimana pedoman yang diberikan oleh camat kepada pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian berikut ini:

1. Memberikan buku-buku

Mengenai pemberian buku-buku yang bisa membantu ataupun menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintahan desa. Pemberian buku pedoman-Pedoman yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan kepada apatur pemerintahan Desa agar ada acuan dalam melaksanakan pemerintahan di desanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayan Pribadi selaku Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.52 wib dikantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu memberikan buku petunjuk teknis mengenai administrasi desa kepada setiap pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi. Pemberian buku teknis tersebut dilakukan baik pemberian dari pemerintah daerah kabupaten atau provinsi atau dari pihak pemerintah pusat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan selalu memberikan buku petunjuk teknis mengenai administrasi desa kepada setiap pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak Kecamatan ada melakukan pemberian buku-buku sebagai petunjuk pemerintah desa menjalankan roda pemerintahannya sejauh ini masih jarang yang ada yaitu berupa pemberian PERDA, undang-undang, dan keputusan-keputusan bupati”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak pemerintah desa pemberian buku-buku sebagai petunjuk pemerintah desa menjalankan roda pemerintahannya sejauh ini masih jarang yang ada yaitu berupa pemberian PERDA, undang-undang, dan keputusan-keputusan bupati dari pihak kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;
“Pihak kecamatan ada memberikan buku Juknis atau Peraturan daerah serta buku petunjuk lainnya bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak pemerintah desa mendapatkan buku Juknis atau Peraturan daerah serta buku petunjuk lainnya bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat yang diberikan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian pemberian buku-buku yang berhubungan dengan administrasi desa pada dasarnya bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena banyak manfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak bisa diharapkan untuk bisa lebih baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Administrasi di pemerintahan desa sangatlah vital dimana segala urusan surat menyurat, tanah, jual beli dan system prosedur dilaksanakan disana. Pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah dibutuhkan dalam menambah pemahaman dan penertiban administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh perangkat desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat data yang terkandung didesa tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa dan menjadi tolak ukur untuk meratakan pembangunan desa karena desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

Dalam menyelenggarakan sebuah tanggung jawab memang diperlukan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman bisa berupa Buku, undang-undang, juknis dan lain-lain.

Pemberian buku-buku pada dasarnya bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena banyak manfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak bisa diharapkan untuk bisa lebih baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Menjelaskan Buku Pedoman Yang Diberikan

Selanjutnya tanggapan responden mengenai menjelaskan pedoman yang diberikan kepada pemerintah desa, karena tidak dengan mudahnya untuk memahami berbagai pedoman yang diberikan untuk membantu dalam memahami tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayan Pribadi selaku Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.52 wib dikantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu memberikan penjelasan terhadap buku pedoman yang diberikan kepada pihak pemerintah desa jika ada yang tidak dipahami bisa langsung menanyakannya kepada pemerintahan kecamatan, jika sebuah pedoman tersebut dikira perlu mendatangkan tenaga ahli maka akan dilaksanakan”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa penjelasan terhadap buku pedoman yang diberikan kepada pihak pemerintah desa jika ada yang tidak dipahami bisa langsung menanyakannya kepada pemerintahan kecamatan, jika sebuah pedoman tersebut dikira perlu mendatangkan tenaga ahli maka akan dilaksanakan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jumri selaku kepala desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak Kecamatan selalu memberikan penjelasan terhadap buku-buku petunjuk yang diberikan kepada pemerintah desa guna menambah pengetahuan dan pemahaman pihak pemerintah desa”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa penjelasan terhadap buku-buku petunjuk yang diberikan kepada pemerintah desa guna menambah pengetahuan dan pemahaman pihak pemerintah desa yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Altofiah selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor Camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan selalu memberikan penjelasan terhadap pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan selalu memberikan penjelasan terhadap pemberian buku berupa Jukni maupun peraturan daerah selalu dilakukan oleh pihak kecamatan kepada setiap pemerintahan desa di kecamatan Tebing Tinggi

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib di kantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Pihak kecamatan ada memberikan penjelasan terhadap buku Juknis atau Peraturan daerah serta buku petunjuk lainnya bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa penjelasan terhadap buku Juknis atau Peraturan daerah serta buku petunjuk lainnya bagi pihak pemerintah desa maupun BPD guna meningkatkan pelayanan dalam pemberian administrasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemberian penjelasan terhadap buku-buku yang diberikan kepada pemerintah desa sangat penting dilakukan guna meningkatkan dan menambah pengetahuan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa bagi masyarakat yang ada di kecamatan Tebing Tinggi.

Pemberian penjelasan terhadap buku-buku yang telah dibagikan oleh pihak kecamatan kepada pihak desa harus disertai dengan pemberian penjelasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan guna memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi perangkat desa terhadap buku yang diberikan oleh pihak kecamatan pada perangkat desa dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa bagi masyarakat.

Pemberian penjelasan terhadap buku-buku yang telah diberikan oleh pihak kecamatan kepada pihak desa pada dasarnya bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena banyak manfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak bisa diharapkan untuk bisa lebih baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5.2 Hambatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Oleh Camat Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Administrasi ini sangat vital karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang mana berhadapan langsung dengan masyarakat dan segala urusan surat menyurat, tanah, sistem prosedur, ktp, jual beli dilaksanakan di pemerintahan desa maka perlunya penataan administrasi di pemerintahan desa dikarenakan data yang ada tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi sebagai tolak ukur bagi pembangunan bangsa karena pembangunan desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

Pada hakekatnya fungsi pembinaan camat merupakan yang tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Dan pada dasarnya pembinaan camat sering juga di artikan sebagai suatu tindakan, pelayan publik terhadap masyarakat secara baik dan

berkenan. Oleh karena itu sangat di butuhkan suatu perilaku yang baik dari pemerintah guna untuk meningkatkan suatu kesadaran dari aparatur pemerintah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

Maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada aparatur pemerintah desa. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh camat terhadap administrasi desa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Wawancara pada Camat Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 Pukul 09.00 wib di kantor camat Tebing Tinggi menyatakan bahwa;

“Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan pembinaan administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu;

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam membina terkait dengan administrasi pemerintahan desa.*
- 2) Keterbatasan pendanaan terkait dengan pembinaan karena memerlukan biaya operasional.*
- 3) Kurangnya pro aktif dan perhatian dari Desa yang ada terkait dengan pembinaan administrasi pemerintahan desa.*

4) *Tingkat kemauan untuk maju masih rendah.*

5) *Kurangnya kerja sama antar lembaga terkait.*

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan pembinaan administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu;

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam membina terkait dengan administrasi pemerintahan desa.
- 2) Keterbatasan pendanaan terkait dengan pembinaan karena memerlukan biaya operasional.
- 3) Kurangnya pro aktif dan perhatian dari Desa yang ada terkait dengan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- 4) Tingkat kemauan untuk maju masih rendah.
- 5) Kurangnya kerja sama antar lembaga terkait.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Sesap pada hari Rabu 07-10-2020 menyatakan bahwa;

“Walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam kelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa Sesap”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa pihak kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam kelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang hanya lulus SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa Sesap.

Demikian juga Berdasarkan Wawancara pada Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Kamis 08-10-2020 jam 10.30 wib di kantor camat Tebing Tinggi mengatakan bahwa;

“Salah satu faktor penghambat dalam kelengkapan administrasi desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing”.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa kelengkapan administrasi desa yaitu kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sehingga masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing yang menjadi salah satu faktor penghambat.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Nursodik selaku kepala BPD Desa Sesap pada hari Selasa 06-10-2020 jam 09.00 wib dikantor Desa Sesap mengatakan bahwa;

“Hambatan sumber daya manusia yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi desa, serta kemampuan yang

belum sesuai dengan bidang yang diampu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi desa.

Dari ungkapan di atas diketahui bahwa hambatan sumber daya manusia yang dimaksud berupa kurangnya staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan di desa dan jumlah yang belum memadai yang ada dalam susunan organisasi desa, serta kemampuan yang belum sesuai dengan bidang yang diampu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan administrasi desa.

Berdasarkan hasil penelitian dampak pada keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di desa. keterlambatan dalam penyerahan laporan menyebabkan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat.

Dalam meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan baik aparat maupun administrasi yang ada di desa agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi desa. Penataan aparat desa dilakukan untuk lebih disiplin waktu, lebih giat bekerja serta diharapkan dapat memahami apa yang dijelaskan pada waktu pemberian bimbingan dan pelatihan oleh pemerintah kecamatan sehingga aparat desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jika dilihat dari

secara keseluruhan gambaran umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun masih ada sedikit hambatan yang dihadapi.

Pembinaan merupakan ciri khas modernisasi di dalam masyarakat tradisional, pemetintah kecamatan dan aparatur desa biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil, petani, tukang, dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan pemerintah dan bukan sekedar mengajukan petisi minta bantuan pembinaan terhadap pemerintah desa terhadap tekanan dari luar sebaiknya prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah di terima oleh semua Negara yang sedang berkembang meskipun bentuk dan kodrat pembinaannya menunjukkan perbedaan yang besar satu sama lain.

Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparatur pemerintah desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.

Kegiatan pembinaan camat terhadap paratur pemerintah desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Cara untuk pembinaan di ukur intesitasnya adalah bagaimana pembinaan camat bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan yang diberikan.

Keadaan inilah harus ada di kecamatan Tebing Tinggi, di mana harus ada upaya-upaya dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya dari pemerintah kecamatan dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam pembinaan aparat desa, banyaknya informan yang menjawab besarnya upaya-upaya dari pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh hanya sebagian kecil saja yang menjawab tidak.

Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistem pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

Dengan adanya peran dari masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan aparat pemerintah desa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat. Pentingnya dilakukan pembinaan terhadap administrasi desa dikarenakan administrasi adalah kelengkapan dari organisasi pemerintahan, tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Dan pentingnya penertiban administrasi desa karena proses administrasi lah data-data suatu organisasi didapat dengan jelas, yang mana desa merupakan ujung tombak pemerintahan sehingga data yang terkandung didalamnya sangat berguna tidak hanya bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembinaan oleh camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Dari hasil penelitian dapat diketahui Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal dilakukan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemerintahan desa Sesap hal ini berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni; Perencanaan sudah dilakukan secara maksimal hal ini disebabkan penyusunan rencana yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam administrasi desa, Bimbingan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal ini disebabkan karena pemberian pelatihan serta rapat kerja tidak dilakukan secara berkala, Pengarahan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal ini disebabkan karena memberikan pengarahan serta pemberian intruksi tidak dilakukan secara berkala oleh camat kepada pemerintah desa, Pelatihan sudah dilaksanakan. Namun belum berjalan secara maksimal karena mendatangkan ahli dalam

memberikan pelatihan masih kurang efektif dilakukan oleh pihak kecamatan serta Pemberian Pedoman sudah dilakukan secara maksimal ini dilakukan dengan pemberian buku pedoman pada aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Tebing Tinggi yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa yang belum memadai dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya ini disebabkan kebanyakan aparatur pemerintah desa hanya tamatan SMA sehingga masih kurang memiliki keahlian dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan. Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi untuk mengatasi hambatan pada Kecamatan Tebing Tinggi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Hendaknya pihak Kecamatan lebih sering mengadakan Rapat kerja agar bisa mengetahui lebih jauh kinerja aparat desa dan memberikan bimbingan/pelatihan seharusnya mempunyai perencanaan yang matang dan memerhatikan pelatihan yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa yakni dengan turun langsung ke kantor desa untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat selain itu pihak kecamatan juga harus memperhatikan kebutuhan dari segi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah desa sehingga pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dilakukan secara maksimal.
2. Hendaknya camat sebagai top leader di kecamatan mampu menjadi pemimbing dan pembina bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk bergotong-royong mengoptimalkan peran dan kinerja dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Serta perlu membangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik pimpinan maupun instansi-instansi vertikal dan otonom agar tercipta keserasian dalam menjalankan setiap program dan kinerja yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Admosudirjo Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta; PT. RinekaCipta.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta. PustakaSetia
- Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiadi, 2009, *Teori Dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Bangun Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Christensen, 2015, *Disruptive Innovation For Social Change*, Boston: Harvard Bussiness Review.
- Fayol Hendry, 2013., *Pengantar Administrasi dan Fungsi-Fungsi Manajemen*. diakses tanggal 2 maret 2014.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keenam belas. Edisi Revisi Jakarta. BumiAksara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Himawan Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta; BinaIlmu.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Jakarta; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia.
- Ulum Ihyauli, 2009, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: BumiAksara.
- Kusnadi. 2005. *Pengantar Menajemen*. Malang; Unibraw Press.
- Kansil, C. ST. 2004. *Pemerintahan Daerah Diindonesia*. Jakarta; SinarGrafika.
- KebanYeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Mayo, Elton, 1945. *The Social Problems Of an Industrial civilization*. Boston :Harverd University.
- Nasution, 2003, *Metode Research Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan daerah*, Jakarta; RinekaCipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Nordiawan Deddy, 2006, *Akutansi Sektor Publik*, Jakarta, SalembaEmpat
- Nurholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. W. J. S, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- R Wayne Mondy. 2008. *Manajemen sumber daya manusia*, Jilid 1 Edisisepuluh. Jakarta, Erlangga
- R. Santoso Brotodiharjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama,
- Riduwan. 2009. *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*. Bandung; Alfabeta.
- Riwu. Kaho Josef. 2005, *Prosfek Otonomi Daerah*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen, 1990, *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Perhalindo
- Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; Djambatan, EdisiRevisi.
- Santoso, 1995. *Konsep Pembinaan Administrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Saydam, Gozali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta; Djambatan.
- Sedarmaryati, 2004, *Good Governance (Pemerintahan yang baik)*. Bandung; Bandar Maju.
- Singarimbu, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta; LP3S
- Siagian, Sondang P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi,1.cetakan,17 Jakarta; Bumi Aksara

- Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep otonomi :Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Setara Press. Jakarta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- Sutrisno Edy, 2020, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Kencana
- Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. DKI Jakarta; Buku Obor.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan birokrasi pemerintahan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta; PT. Raja GrafindoPersada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelemggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja GrafindoPersada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2000. *Asas-Asas Manajemen*, Bandung. Alumni.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Widodo Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Surabaya, Insan Cendekia.

Wijaya, 2016, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung; Pustaka Setia.

Yeremias T. Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta. Gava Media.

Jurnal

Aprianida. 2016. Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi . Jom Fisip Vol 3. No. 2

Fang William. et.al.2020. Governmental And Increasing FDA OversightOf Regenwative Medicine Product. JournalPre-Proof.

Ngar Yin Mah - Daphne. 2019. Conceptualising Government – Market Dynamics In Socio – Technical Energy Trantisition. Geoforum

Rukanova Borianana. et.al. 2020. Indetifying The Value Of Data Analytics In The Context Of Government Supervision : Insights From The Customs Domain. Government Information Quartely.

Lopez Rueda Nur. et.al. 2019. Evolution And Latest Trends Of Local Government Efficienly : Worldwide Research. Journal Of Cleaner Production

Wang Jiaoe. et.al. 2019. Inter – City Connections In China : High – Speed Train Vs, Inter – City Coach. Journal Of Transport Geography.

Polat Abidin Zeynel. et.al. 2020. The Role Government In Land Registry And Cadasture Service In Turkey : Towrds A Government 3.0 Perspective. Land Use Policy.

Garcia – Gil Ramon. J. et.al. 2020. Towards A Comprehensive Understanding Of Digital Government Success : Integrating Implementation And Adoption Factors. Government Information Quartely.

You Lie.Et.Al. 2020 A Benefit Evaluation Model For Build – Up Land Use In Megacity Suburban Districts. Land Use Policy.

Budi Ayuning Fitriah Nur. et.al. 2020. A Study Of Government 2.0 Implementation Indonesia. Journal Pre- Proof.

Ali Omar Al.Et.Al. 2020. The Role Of Government Regulation In The Adoption Of Cloud Computing : A Case Study Of Local Government. Scienccdirect .

Alonso Juncal.Et.Al. 2016. Transformational Cloud Government (TTCG) : Transforming Public Administration With A Cloud Of Publik Services. Scienccdirect

- Arduini Davide. Et. Al. 2013. The Role Of Technology, Organization And Contextual Factors In The Development Of E – Government Services : An Empirical Analysis On Italian Local Public Administration. Structural Change And Economic Dynamics.
- Banerjee Parthasarathi. 2001. What Does It Mean To Empower Informationally The Local Government ! – Designing An Information System For A District Level Development Administration. Information
- Bryson J. Philip. 2008. State Administration Vs. Self – Government In The Slovak And Czech Republics. Sciencedirect
- Houssesmand Claude. et al. 2012. How Can Coaching Make A Positive Impact Within Educational Settings ?. . Sciencedirect
- Wei Jia. Et. Al. 2020. Stakeholder Game In The Evolution And Development Of Green Buildings In China : Government Led – Perspective. Journal Of Cleaner Production
- Giamellaro Michael. et. al. 2018. Coaching Teachers To Implement Innovations In Stem . Teaching And Teacher Education.
- Arino Casalo. V.L. . et. al. 2014. Rebuilding Public Trust In Government Administrations Through E- Government Actions. Revista Espanola De Investigacion De Marketing Esic.
- Gregory Anne. 2018. UK Government Communication : The Cameron Years And Their Ongoing Legacy. Public Relation Review.
- Davies Jim. et. al. 2011. Government Information Network - Mapping Electronic Governance Cases Through Public Administration Concepts. Government Information Quarterly.
- Rattso Jorn. et. al. 1995. Spending And Overspending In Local Government Administrations : A Minimum Requirement Approach Applied To Norway. European Journal Of Political Economic
- Kinder. T. 2001. Introducing An Infrastructure For Joined-Up-Government In Local Public Administration : A West Lothian Case Study. Research Policy.
- Nielen R. Sarah. et. al. 2019. The Social Studies Teacher – Coach : A Quantitative Analysis Comparing Coaches And Non-Coaches Across How/What They. The Journal Of Social Studies Research.
- Li Guicai. et. al. 2019. Government – Backed `Laundering Of The Grey` In Upgrading Urban Village Properties Ningmeng Apartment Project In Shuiwei Village, Shenzhen, China. Progress In Planning.

- Tsao` Jacob. et.al. 2019. Mathematical Models Of Political Districting For More Representitive Government. Computers & Industrial Engineering.
- Yusuf Muh. et.al. 2015. Stakeholders Analisis: Managing Coastal Policy Implementation In Rembang District. Sciencedirect.
- Osode Esther Oluwanbepelumi Olanubi Orioye Sijuola. 2016. Title : The Efficiency Of Government Spending On Health A Comparison Of Different Administration In Nigeria. Accepted Manuscript.
- Elidjen. et.al.2015. Evaluating The Role E – Government On Public Administration Reform : Case Of Official City Government Websites In Indonesia. Sience Direct.
- Broek Vande Gertet. et.al.1995. Coaching The Coach : Intervention Effects On Need-Suppoortive Coaching Behavior And Athlete Motivation Andengagement. Psychology Of Sport & Exercise.
- Roe. .M. Emery. 1995. More That The Politics Of Decentralization : Local Government Reform, District Development And Public Administration In Zimbabwe.
- Surujlal J. 2015. Influence Of Outlook Toward Work On Enterpreneurial Potential Of Professional Sport Coaches In South Africa. Science Direct.
- Sullivan Jane. et.al.2019. Examining “Best Practies” For Literacy Coaching And Monitoring : Evidence From Northern Nigeria Nd Ghana. Social Sciences & Humanities Open.
- Siegel R. Deborah. et.al.2018. Coaching Teachers To Implement Innovations In Stem. Teaching And Teacher Education
- Guan Youyi. et.al.2014. The Electronic Government Performnce Of Environmental Protection Administrations In Anhui Province, China. Technological Forecasting & Social Change
- Li Guicai. et.al.2019. Government-Backed `Laundering Of The Grey` In Upgrading Urban Village Properties Ningmeng Apartment Project In Village, Shenxhen, China
- Meirelles Paulo. et.al. 2020. Leading Successful Government-Academia Collaborations Using Floss And Agile Values. The Journal Of Systems And Software
- Wilfahrt Martha.2017.The Politics Of Locl Government Performance : Elite Cohesion Nd Cross – Village Constraints In Decentralied Senegal. World Development

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau